

SKRIPSI

**AGENDA SETTING PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ALTERNATIF:
UPAYA MEMBANGUN PARTAI MASSA RAKYAT OLEH KESATUAN
PERJUANGAN RAKYAT**

*(Studi Penelitian Kualitatif di Kesatuan Perjuangan Rakyat Badan - Pekerja
Daerah Yogyakarta)*



Disusun Oleh:

UMBU RUSDIYANTO TARAMBANI

16520090

JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN JUDUL

**AGENDA SETTING PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ALTERNATIF:
UPAYA MEMBANGUN PARTAI MASSA RAKYAT OLEH KESATUAN
PERJUANGAN RAKYAT**

*(Studi Penelitian Kualitatif di Kesatuan Perjuangan Rakyat Badan - Pekerja
Daerah Yogyakarta)*

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Di susun Oleh:

UMBU RUSDYANTO TARAMBANI

16520090



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

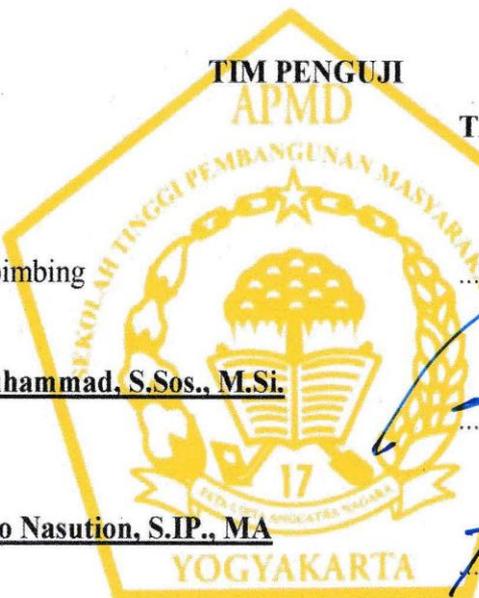
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Agustus 2022

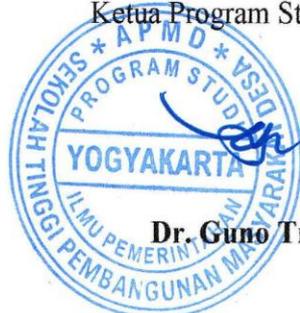
Jam : 12:00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA	TIM PENGUJI APMD	TANDA TANGAN
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.</u> Penguji samping I		
<u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA</u> Penguji Samping II		

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“AGENDA SETTING PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ALTERNATIF: Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat Oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat”** yang berpenelitian di organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) – Badan Pekerja Daerah (BPD) Yogyakarta, adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban dalam menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Adapun sumber data yang saya gunakan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini telah dicantumkan di dalam naskah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiasi dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI PEMPEL'. The serial number '65748AJX948230081' is visible at the bottom of the stamp.

Umbu Rusdiyanto Tarambani

16520090

MOTTO

Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.

(Amsal 31:9)

Tiada kemengan yang dapat diraih tanpa suatu pertaruhan, pengorbanan dan perjuangan.

(Umbu Rusdiyanto Tarambani)

Ingat Tuhan, jangan coba-coba melanggar titah Tuhan, kamu bersatu dan saling mengasihi, ingat keluarga yang miskin, kamu semua berbahagia.

(Pesan Buku/Appu)

Ibarat air sungai yang terus mengalir dari hulu sampai hilir. Jika masa depan dapat diperbaiki, jangan membandingkannya dengan masa lalu.

(Umbu Nggaba)

Tiada kebahagiaan yang sejati tanpa terciptanya sosialisme.

(Diana TR)

Bergerak bersama rakyat rebut demokrasi sejati.

(Semboyan SMI)

Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. perubahan itu mutlak.

(Heraclitus)

Terbentur, terbentur, terbentur, TERBENTUK!

(Tan Malaka)

Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri.

(Pramoedya Ananta Toer)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpah terima kasih, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan memberikan kenikmatan hidup kepada hamba-Nya yang hina ini.
2. Kepada orang tua tercinta, Bapak Ngunju Tarambani dan Ibu Ester Epa Lelak sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya. Berkat kasih sayang mereka yang selama ini telah mendukung saya baik secara moril maupun materil dalam proses tumbuh-kembang hingga akhirnya saya pun menjadi seorang terpelajar.
3. Kepada kakak Umbu Donnart Tarambani, adik Rambu Veronita Taramabani dan adik Umbu Alvin Tarambani. Terima kasih karena kita telah berbagi kasih sayang sebagai saudara, walaupun sering terjadi pertengkaran diantara kita tetapi sejatinya kita saling menyayangi antara satu sama lain.
4. Kepada keluarga besar baik dari keluarga bapak maupun ibu. Terima kasih karena selama ini sudah mendukung dan menyemangati saya baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua tetap rukun, damai dan utuh dalam ikatan kekeluargaan.
5. Kepada Serikat Mahasiswa Indonesia, khususnya Komite Pimpinan Komisariat STPMD “APMD” Yogyakarta dan Komite Pimpinan Cabang Yogyakarta. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih karena melalui organisasi inilah saya dapat belajar maupun terlibat secara langsung dalam perjuangan kemanusiaan, perjuangan politik maupun perjuangan demokratik. Setidaknya melalui SMI saya dapat mengartikulasikan nilai-nilai moral seorang terpelajar dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta melawan segala bentuk penindasan. Semoga SMI tetap “Cerdas, Militan dan Rakyat” sesuai dengan slogan perjuangannya.
6. Kepada kawan-kawan di Serikat Mahasiswa Indonesia dimanapun kalian berada tanpa saya sebutkan namanya satu per satu, khususnya kawan-kawan di SMI Cabang Yogyakarta yang selama ini sudah kebersamaan saya dalam berbagai dinamika. Terima kasih karena kita sudah berbagi kisah baik suka maupun duka. Semoga kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip

perjuangan yang sudah sama-sama kita dapatkan dari organisasi, tetap solid, serta tetap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah (setara).

7. Kepada Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) dan segenap pengurus, anggota maupun organisasi massa yang bergabung di dalamnya. Saya persembahkan sebagai ucapan terima kasih kerane saya sudah dibolehkan untuk melakukan penelitian di KPR dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita perjuangan KPR dapat tercapai, khususnya dalam upaya membangun partai massa rakyat sebagai partai alternatif. Kiranya KPR tetap konsisten dalam garis perjuangan dan setia terhadap garis massa seperti pada slogan KPR, yakni “Berjuangan Bersama Rakyat” sebagai bentuk keberpihakan terhadap massa rakyat.
8. Kepada Krispina Adpenalia yang selalu berbagi kisah baik suka maupun duka. Terima kasih atas semua kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Semoga hal-hal baik senantiasa bersamamu.
9. Kepada kawan-kawan seperjuangan dari berbagai organisasi progresif dan maupun individu pro-demokrasi di Yogyakarta yang terhimpun di dalam aliansi Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), Komite Kampus Yogyakarta (KKY), Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dan aliansi lainnya. Selama berdinamika dan berjuang bersama kalian, saya belajar betapa pentingnya solidaritas dan persatuan dalam perjuangan. Terima kasih dan panjang umur perjuangan.
10. Kepada kawan-kawan dari organisasi internal maupun eksternal kampus yang berdinamikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Bersama-sama kita menciptakan dinamika kampus yang kritis dengan berbagai rangkaian seperti diskusi, konsolidasi, mimbar bebas dan panggung demokrasi sehingga tiada hal yang membosankan selama saya mengenyam pendidikan di kampus ini.
11. Kepada Gailaru Marada, Keluarga Lewa Yogyakarta, Sumba APMD dan Hipmasty, sebagai organisasi daerah dimana saya dapat merasakan suasana kekeluargaan di tanah rantauan walaupun saya kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi.
12. Kepada Bung Jemi Mahemba, Udjo Piranyawa, Umbu Candra, Umbu Domu, Ardi Bora, Luis Mede, Kristian, Gusti, Bruno, Aden, Anno Niron, Waris, Bella, Vijai, UH, Yandi, Sean, Diki, UK, El Savan, Audi, Una, El Roy, Eston, Monang, Aydos, Mulyadin, Yosa, Wella, Yance, Agus, Wahid, Rian Santula,

Rahmi, Fida, Wahyu, Helga, Pratama, Mikie, Sultan, Hengki, Claudia, Irhas, Ferry, Restu, Wong, Wawan, Soni, Irawan, Aldy, Gilang, Jufry, Iskandar, Ali, Sandro, Willy, Yanto dan kawan-kawan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih karena sudah menjadi orang baik disekitar saya selama ini.

13. Kepada saudara-saudara yang selalu bersama saya selama di Yogyakarta, om Umbu Tamu, om Ardian, sepupu Umbu Hamapati, Rian Njurumana, Ilwan, Risma, Era, Iche, Ervin, Arens, Rinto, Yandri, Nuning, Nurti, Umbu Valen, Jack Rima, Maya, Risky, Reksi, Abdy, Yongki dan Umbu Hapu. Terima kasih atas berbagai momen kebersamaan dan kekeluargaan selama di Yogyakarta. Semoga kalian sukses selalu.
14. Kepada almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta tempat saya menimba ilmu. Terimakasih juga kepada para dosen yang sudah berbagi pengetahuan kepada saya, kepada para pegawai yang sudah memberikan pelayanan dalam proses perkuliahan, dan para mahasiswa yang sudah menjadi kawan belajar, diskusi, nongkrong dan ngobrol dengan saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“AGENDA SETTING PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ALTERNATIF: Upaya Membangun Partai Massa Rakyat Oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat”**. Sehingga skripsi ini dapat menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi referensi, penghimpunan data maupun interpretasi yang harapannya dapat disempurnahkan oleh peneliti lainnya dikemudian hari sebagai proses dialektika ilmu pengetahuan itu sendiri. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak—baik secara langsung ataupun tidak langsung—yang mendukung hingga selesainya skripsi ini dengan baik. Maka dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya, penulis mengucapkan limpah terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk belajar, berdinamika dan berdialektika yang memberikan banyak pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak sumbangsih Pemikiran. Ide, gagasan maupun referensi yang berkontribusi dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
6. Staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang proses perkuliahan.
7. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) – Badan Pekerja Daerah (BPD) Yogyakarta sebagai tempat penelitian, dan telah membantu untuk memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Berangkat dari segala keterbatasan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, maka kepada siapapun yang menyempatkan diri untuk membaca karya ini, dengan penuh keterbukaan penulis mengharapkan kritiki dan saran guna penyempurnaan skripsi ini dan dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi penulis. Akhir kata, salam hormat dan terimakasih.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022

Umbu Rusdiyanto Tarambani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	1
D. Manfaat Penelitian	1
E. Literatur Review	2
F. Kerangka Konseptual.....	12
1. <i>Agenda Setting</i>	12
2. Partai Politik.....	14

3. Perspektif Marxisme Sebagai Politik Alternatif.....	32
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	82
H. Metode Penelitian	82
1. Jenis Penelitian.....	83
2. Lokasi Penelitian	83
3. Subyek Penelitian.....	84
4. Teknik Pengumpulan Data	85
5. Teknik Analisis Data.....	87
BAB II TENTANG FRONT KESATUAN PERJUANGAN RAKYAT (KPR)	89
A. Sejarah Front Kesatuan Perjuangan Rakyat.....	89
B. Tujuan Front.....	92
C. Garis Politik dan Platform Perjuangan Front.....	92
D. Mekanisme Front	94
E. Pokok-pokok Pekerjaan Front.....	95
F. Isu-isu Umum Front.....	95
G. Perluasan Struktur dan Basis	96
H. Struktur Front.....	97
BAB III ANALISIS PROSES AGENDA SETTING DALAM UPAYA MEMBANGUN PARTAI MASSA RAKYAT	100
A. Perspektif Dibalik Pembentukan Partai Massa Rakyat.....	100
1. Politik Berperspektif Kelas	101
2. Kelas dan Perjuangan Kelas	104

B.	Konsep Partai Massa Rakyat Menurut Kesatuan Perjuangan Rakyat	108
1.	Partai Massa Rakyat Sebagai Alat Politik Alternatif	109
2.	Persatuan Gerakan Rakyat Menuju Partai Massa	113
3.	Hal Prinsipil Dalam Membangun Partai Massa	119
4.	Pola Perjuangan Partai Massa Rakyat	127
C.	Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat.....	136
1.	Perencanaan.....	137
2.	Strategi	142
3.	Capaian.....	157
4.	Respon Publik	160
5.	Hambatan	168
BAB IV	PENUTUP	179
A.	Kesimpulan	179
B.	Saran	183
DAFTAR PUSTAKA:	186
LAMPIRAN	190

DAFTAR TABEL

1.1. Daftar Informan.....	93
---------------------------	----

DAFTAR BAGAN

2.1. Bagan Struktur KPR-BPD Yogyakarta.....	108
---	-----

INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait proses *agenda setting* pembentukan partai politik alternatif yang diinisiasi oleh organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) dalam upaya membangun partai massa rakyat. Penelitian ini berangkat dari masalah yang dihadapi oleh massa rakyat pasca reformasi sekarang ini, sekalipun dikenal sebagai fase transisi demokrasi, tetapi nyatanya belum mampu membawa perubahan untuk negara dan rakyat Indonesia kearah yang lebih baik. Sehingga KPR menilai bahwa partai dan elit politik yang ada dewasa ini telah terjangkiti oleh kepentingan kelompok oligarki maupun borjuis-kapitalis. Kondisi tersebut kemudian mendorong KPR untuk membangun partai alternatif yang bertipe partai massa. Berangkat dari persoalan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat Oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat”.

Masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menepohong sejauh mana proses *agenda setting* yang dilakukan oleh organisasi KPR dalam membangun partai massa rakyat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data ataupun informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mendasari munculnya perspektif politik alternatif dari KPR, berangkat dari pandangan bahwa minimnya institusi politik saat ini yang merepresentasikan kepentingan massa rakyat arus bawah (akar rumput). Sehingga KPR menginisiasi pembentukan partai politik alternatif, yakni “Partai Massa Rakyat”—yang dilatarbelakangi oleh gagasan “politik berperspektif kelas”—dengan orientasi keberpihakan terhadap kelas pekerja dan massa rakyat tertindas lainnya. Namun sayangnya, secara infastruktur maupun supra struktur organisasi, KPR masih belum mempuni untuk membangun partai massa dalam rentang waktu yang singkat karena berbagai faktor yang menyulitkan dan memberatkan. Misalnya, pembungkaman ruang demokrasi dari negara, regulasi seperti UU Partai Politik dan Pemilu karena syarat-syaratnya sangat memberatkan rakyat akar rumput untuk membangun partainya sendiri dan ikut serta dalam kontestasi politik elektoral.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pembangunan partai massa rakyat yang di inisiasi oleh KPR, tidak serta merta diorientasikan untuk sekedar mengikuti kontestasi politik elektoral. Tetapi partai massa kedepan dapat memainkan peranan dalam menyatukan dan mengonsolidasikan perjuangan rakyat di akar rumput, untuk perjuangan politik bersama dalam melawan dominasi dan hegemoni kaum borjuasi yang merupakan perpanjangan tangan dari kapitalisme-imperialisme. Sehingga disatu sisi partai massa rakyat kedepan dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) dan posisi KPR untuk sekarang ini sebagai kelompok penekan (*pressure group*).

Kata Kunci: *Agenda Setting, partai alternatif, Partai Massa, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia partai politik telah merupakan bagian dalam kehidupan politik selama ini dan bahkan sebelum kemerdekaan, rakyat sudah mengenal partai politik. Di Indonesia sejak awal mengenal sistem multi-partai (*multi party system*), sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah kita. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara dan rakyat untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Namun kelahirannya memiliki sejarah yang cukup panjang. Ini dapat kita lihat pasca kemerdekaan Indonesia di masa orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno, begitu banyak partai yang bermunculan dengan berbagai historis dan spektrum ideologinya masing-masing. Kemudian pada masa orde baru (Orba) dibawah kekuasaan Soeharto (1965-1998), organisasi sosial politik (orsopol) diunifikasi menjadi tiga partai. Namun dapat juga dikategorikan sebagai multi partai dengan dominasi satu partai yaitu partai Golongan Karya (Golkar)—Sekalipun Golkar pada masa orde baru tidak secara resmi menganggap dirinya sebagai partai politik, akan tetapi Golkar tercakup dalam istilah partai politik pada umumnya. Hingga pada akhirnya tahun 1998 melalui masa reformasi (lengsernya Soeharto), Indonesia kembali pada sistem multi partai tanpa dominasi satu partai.

Inilah babak baru dimasa reformasi (1998-sekarang) dimana sistem demokratisasi politik kembali dibuka seluasnya bagi rakyat. Sistem Demokrasi Multi Partai (*multi party system*) di Indonesia, merupakan salah satu hasil perjuangan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sejak rezim otoritarianisme Orde Baru digulingkan dari tampuk kekuasaan. Sejak masa reformasi, ada banyak partai yang kemudian muncul secara terbuka, dengan beragam spektrum ideologi, bahkan beranak pinak dari partai-partai besar

sebelumnya. Tentu saja ini merupakan suatu perjuangan panjang dalam memajukan kualitas demokrasi dan perjuangan melawan *status quo*.

Namun dewasa ini sangat disayangkan bahwa perkembangan politik di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan oligarkis (baca: Oligarki). Jeffrey A. Winters (2013), dalam tulisannya yang berjudul “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan materil (oligark). Fenomena ini semakin menguat ditengah merebaknya ekspansi neoliberalisme di Indonesia (baca: Neoliberalisme di Indonesia). Akibatnya, kepentingan rakyat semakin termarginalkan. Berbagai permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti pencabutan subsidi pemerintah secara bertahap, upah murah, perampasan tanah, kerusakan ekologis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, hingga represifitas aparat negara terhadap aktifitas perjuangan rakyat terus merebak sampai saat ini.

Di ranah politik sendiri, kancah politik elektoral masih didominasi oleh partai-partai perwakilan borjuasi yang sebagian besar aktornya adalah elit-elit politik lama dan kaum modal. Borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Marxisme mendefinisikan borjuis sebagai kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Marxisme memandang bahwa kelompok ini muncul dari kelas-kelas orang kaya di perkotaan pada masa pra (sebelum) dan awal masyarakat kapitalis. Dalam perkembangannya di Indonesia, kelompok inilah (borjuasi) yang mendominasi perilaku politik nasional melalui partai-partai politik dan pemilihan umum (pemilu) dalam meraih kekuasaan untuk mengintervensi kebijakan ekonomi-politik negara demi kepentingan segelintir orang. Per oktober 2019 misalnya, Menurut temuan Auriga dan

Tempo, ada sebanyak 262 orang atau 45,5% dari 575 anggota DPR (2019-2024) terafiliasi dengan perusahaan yang bergerak diberbagai sektor dan menduduki posisi strategis dalam perusahaan (Majalah.Tempo.co/05/10/2019)¹. Begitu juga dengan DPR yang lainnya, sekalipun bukan pengusaha tetapi merupakan orang yang memiliki kecukupan ekonomi atau tergolong menengah keatas. Parahnya, semua partai pemenang pemilu tidak ada satu pun yang terbebas dari kelompok borjuis tersebut. Lebih lanjut, hampir semua partai peserta pemilu tetap mengusung calon eks nabi koruptor sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 (kompas.com-21/092018)².

Uraian diatas telah membuktikan bahwa partai politik yang ada saat ini masih didominasi oleh kaum borjuis mulai dari anggota, pengurus hingga pimpinan partai. Partai politik yang demikian, sekalipun terdapat anggota partai atau calon legislatif dari kalangan masyarakat menengah kebawah, namun tidak dapat berbuat banyak untuk perubahan selain sekedar penyumbang suara untuk partai dalam memperoleh kursi di parlemen. Partai-partai borjuis ini, alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, justru semakin menancapkan pengaruh dan memajukan kepentingan mereka dalam saluran-saluran politik yang ada. Terutama dengan membuat sistem kepartaian Indonesia semakin terkartelisasi, maka semakin memperkecil ruang bagi gerakan-gerakan sosial untuk memperjuangkan kepentingannya melalui pemilihan umum (pemilu).

Sistem perwakilan, elit dan partai politik, serta perilaku politik di Indonesia yang didominasi oleh kelas borjuasi tentu saja mengakibatkan konsekuensi yang pahit bagi

¹ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>.

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/06420001/ini-daftar-13-parpol-yang-usung-caleg-eks-koruptor>.

rakyat. Dimana kepentingan dan aspirasi rakyat tidak lagi menjadi prioritas dan dinomorduakan demi kepentingan pribadi/kelompok segelintir orang untuk memperkaya diri. Dalam hal ini, negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan kelas yang berkuasa sehingga kebijakan maupun regulasi yang dilahirkan melalui pemerintahan (legislatif dan eksekutif) cenderung menguntungkan mereka disatu pihak dan merugikan mayoritas rakyat dilain pihak. Dalam masyarakat kapitalis, menurut Marx, semua sistem ekonomi dan politik telah dikuasai oleh kelas atas para penguasa negara. Marx menyimpulkan bahwa negara hanyalah kepanjangan tangan dari kelas atas untuk mengamankan status kekuasaan mereka. Prespektif ini dapat menjelaskan mengapa biasanya yang menjadi korban adalah rakyat kecil, pencuri kecil dihukum lebih berat dari koruptor dan terkesan kelas atas sangat kebal dengan hukum yang berlaku. Fenomena ini serupa dengan pandangan Marx dan Engels: *“Negara tidak lain tidak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lain”*.³

Berangkat dari uraian fenomena diatas, maka tidak diherankan ketika pasca reformasi hingga sekarang gelombang kritik semakin masif dari mayoritas rakyat (Buruh, Petani, Mahasiswa, Masyarakat adat, akademisi, aktivis dan organisasi sosial pro-demokrasi, dll). Bahkan dalam beberapa momentum, gelombang demonstrasi berkejolak dan bertumpahruah dijalanan disetiap kota dan daerah. Belakangan ini misalnya, pada september 2019 dapat dilihat bagaimana gelombang demonstran yang ditandai dengan istilah “Reformasi Dikorupsi”, secara masif mengkritik dan menolak Revisi UU KPK, KUHP, UU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dll. Kemudian berlanjut selama tahun 2020, dengan

³ <https://dialektika-nusantara.blogspot.com/2016/10/pemikiran-marx-dan-konsep-negara.html>.

kecaman yang bernada “Mosi Tidak Percaya” mengkritik dan menolak perumusan hingga pengesahan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Hal ini bukan berarti tanpa alasan, sederhananya karena regulasi-regulasi tersebut dianggap tidak mencerminkan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat dan justru untuk kepentingan elit politik dan kaum modal itu sendiri. Tentu saja ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat atas kebijakan negara dalam hal ini pemerintah yang syarat dengan kepentingan modal, dan disisi lain menegaskan kepentingan mayoritas rakyat dalam memenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Entah gejala tersebut muncul secara spontan maupun dengan penuh kesadaran yang tinggi, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan massa rakyat sebagai konstituen yang memilih perwakilannya di parlemen maupun presiden itu sendiri, akan tetapi lagi-lagi rakyat dibohongi dan dikhianati. Kontestasi lima tahunan melalui pemilu, dimana bualan janji-janji palsu para elit dan partai politik borjuasi nyatanya hanya mengilusi kesadaran rakyat untuk tetap mendukung dan menitipkan nasibnya kepada mereka. Hal ini dapat dilihat setelah mereka (elit dan partai politik borjuasi) memperoleh kursi kekuasaan, nyatanya mereka tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat rakyat sehingga tidak membawa perubahan yang signifikan untuk negara dan bangsa. Maka ketidakpercayaan massa rakyat terhadap elit dan partai politik borjuasi adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dielakkan lagi.

Namun, perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat yang selama ini telah dibajak oleh oligarki melalui pemilu kemudian mengalami kebuntuan. Sebab, pemilu dalam sitem demokrasi liberal hanya memfasilitasi dan dapat mudah diakses oleh kelompok borjuasi melalui partai-partai politik yang ada dan tidak merepresentasikan kepentingan massa rakyat. Oleh karenanya, kebutuhan akan partai politik alternatif semakin mendesak sebagai upaya untuk meneruskan perjuangan normatif gerakan sosial ke ranah

politik, sebagai *antitesa* dari partai politik borjuasi yang tidak mengakomodir kepentingan rakyat lapisan bawah (akar rumput). Politik Indonesia sesungguhnya merupakan arena perjuangan kelas antara kelas borjuis seperti kaum modal dan pengusaha dengan kelas pekerja seperti buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kota, dan segenap rakyat miskin lainnya—yang merupakan mayoritas dari jumlah penduduk Indonesia.

Dalam konteks pasca reformasi saat ini, penting untuk gerakan rakyat melakukan eksperimen politik elektoral. Namun bukan berarti hanya sekedar memanfaatkan ruang keterbukaan politik yang ada, tetapi juga untuk memajukan agenda-agenda perjuangan rakyat secara lebih jauh dan mendalam melalui taktik elektoral. Penulis melihat potensi ini dapat hadir dari gerakan sosial pro-demokrasi (Prodem). Namun kebutuhan dan tantangan gerakan sosial prodem adalah bagaimana mobilisasi dan konsolidasi massa rakyat dalam melawan kekuatan oligarki? Bagaimana strategi dan taktik gerakan sosial mewujudkan partai alternatif tersebut? Seperti apa model dan bentuk partai yang digagas? Tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terperinci oleh gerakan sosial, baik secara teoritik maupun praktik.

Melihat fragmentasi gerakan sosial di Indonesia yang begitu banyak variannya, maka penulis hendak memfokuskan penelitian tentang “Agenda Setting Pembentukan Partai Politik Alternatif” pada salah satu organisasi sosial, yakni organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat atau yang disingkat KPR khususnya di Badan Pekerja Daerah (BPD) Yogyakarta. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) adalah salah satu dari berbagai gerakan rakyat yang ada dan berdinamika di Indonesia saat ini. KPR merupakan organisasi multi sektor atau front yang bersifat nasional, yang menghimpun organisasi massa dari berbagai sektor dalam kerangka persatuan nasional. Persatuan nasional yang dimaksudkan adalah bersatunya organisasi-organisasi yang bersifat nasional dalam sebuah front (KPR), untuk mencapai tujuan bersama dalam perjuangan gerakan rakyat. Adapun organisasi gerakan yang menjadi

unsur KPR secara nasional saat ini, yakni Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), Barisan Masyarakat Indonesia (BMI) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Kemudian, melalui proses dialektik yang cukup panjang, konsolidasi-konsolidasi, uji kerja persatuan, membuat program perjuangan bersama, membentuk komite aksi bersama, dan akhirnya pada tahun 2018 organisasi-organisasi tersebut bersepakat untuk membangun persatuan yang lebih strategis—dengan tujuan menyatukan kekuatan perjuangan rakyat dari latar belakang sektor yang berbeda-beda. (Baca: Tentang Kesatuan Perjuangan Rakyat).

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, KPR yang merupakan bagian dari gerakan rakyat, juga turut mewarnai wacana dan gagasan pembentukan partai politik alternatif dalam eskalasi gerakan rakyat di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ini dapat dilihat dalam setiap kampanye KPR yang senantiasa mendorong pembentukan partai alternatif oleh gerakan rakyat Indonesia (Baca: Pernyataan Sikap Politik Kesatuan Perjuangan Rakyat). Namun yang menarik perhatian bagi peneliti adalah makna partai politik alternatif dari sudut pandang KPR, dimana menyatakan memiliki “prinsip” yang berbeda dengan kebanyakan partai politik saat ini, baik secara gagasan maupun cita-cita perjuangan politiknya. Saat aksi serentak nasional dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (*May Day*) pada tahun 2020 misalnya, KPR mengusung tema “*Di Bawah Sistem Kapitalisme Rezim Borjuasi Telah Gagal Melindungi Rakyat, Saatnya Bangun Partai Massa Rakyat*”. Pernyataan sikap KPR tersebut sedikit menguraikan wacana pembangunan partai massa rakyat yang dimaksud yakni sebagai berikut:

“Apa itu Partai Massa Rakyat, ialah Partai yang lahir dari rahim rakyat sendiri atas inisiatif persatuan antara elemen gerakan rakyat diberbagai sektor seperti buruh, tani, mahasiswa, pemuda, perempuan, masyarakat desa dll yang mempunyai cita-cita yang sama yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi,

demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya. Selain itu, Partai Massa Rakyat akan menjadi kekuatan rakyat untuk berhadap-hadapan dengan kekuatan Partai Politik Borjuasi yang saat ini ada, agar rakyat tidak lagi menitipkan nasib kepada Partai Politik Borjuasi yang selama ini terbukti selalu membohongi dan menipu rakyat.”⁴

Peneliti memandang bahwa gagasan diatas tentu saja merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan KPR secara organisasional terhadap partai politik yang ada saat ini, sehingga menyerukan pembangunan partai massa rakyat sebagai suatu kendaraan politik yang lahir dari kesadaran rakyat dalam perjuangan politik elektoral. Yang diperhatikan oleh peneliti, bahwa gagasan ini tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba bagaikan turun dari langit, namun berangkat dari pembacaan situasi yang mendalam, dan memiliki imajinasi perjuangan politik yang jangka panjang demi mewujudkan cita-cita perjuangan gerakan rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis hendak menganalisis tapak terjang Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) dalam upayanya membangun alat politik alternatif yang dimaksud, yakni “Partai Massa Rakyat” di Indonesia—sebagai wadah politik dan persatuan, sekaligus menjadi garis demarkasi massa rakyat dalam melawan dominasi oligarki. Selanjutnya, partai alternatif tersebut menjadi *antitesa* daripada partai politik borjuis saat ini—yang tidak merepresentasikan kepentingan rakyat ditataran akar rumput.

⁴ <https://arahrakyat.com/komite-perjuangan-rakyat-sikap-politik-mei-berlawan-2020/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis hendak mengajukan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu **“Bagaimana Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat oleh Organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)”?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Sebagai karya ilmiah untuk menyelesaikan studi akhir mahasiswa Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S-1) di Sekola Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD “APMD”) Yogyakarta.
2. Mendekripsikan alasan yang mendasari munculnya gagasan Pembentukan Partai Politik Alternatif dan konsep Partai Massa Rakyat yang dimaksudkan oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat
3. Mempelajari dan memahami strategi dan taktik (stratak) yang digunakan dalam upaya pembangunan Partai Massa Rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat.
4. Meningkatkan kemampuan intelektualitas dalam menganalisis dan mengembangkan daya kritis terhadap setiap fenomena yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini untuk sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Sebagai referensi untuk karya ilmiah selanjutnya yang serupa baik bagi mahasiswa di STPMD “APMD” Yogyakarta maupun kepada masyarakat umum.
 2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian terkait konsep partai alternatif di Indonesia.
- b. Secara Praktis

1. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Strata satu (S-1) Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD “APMD”) Yogyakarta.
2. Dapat diterapkan dalam aktivitas sosial-politik massa rakyat untuk membangun partai yang lahir dari rahim rakyat itu sendiri.

E. Literatur Review

Dalam mengerjakan literatur review pada proposal penelitian ini, peneliti menghimpun, mengomparasi dan mengelaborasi beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan berkesinambungan dengan topik penelitian yakni “Analisis Wacana Politik Alternatif: Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat Oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat”, yang akan peneliti uraikan sebagai berikut dibawah ini:

Pertama, Jurnal Penelitian oleh Rully Chairul Azwar (2017) yang berjudul “Partai Politik Ditengah Ancaman Virus Oligarki dan Politik Kartel”, menjelaskan bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kedudukan dan peranan sangat penting bagi partai politik, utamanya dalam rekrutmen pejabat eksekutif dan legislatif. Sayangnya, secara internal kondisi partai politik sebagai infastruktur politik dinilai belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsi-fungsi idealnya, sehingga output dalam bentuk suprastruktur politik (Presiden dan DPR) juga dianggap kurang memuaskan. Ditengarai, disfungsiionalitas itu disebabkan partai di Indonesia saat ini tengah digerogeti dua macam virus. 1) *Virus oligarki*, dimana partai secara internal dikelola dan dikuasai oleh segelintir elit penguasa modal yang memiliki tujuan-tujuan politik pragmatis jangka pendek; 2) Sebagai akibat yang pertama, dalam perilaku eksternalnya, partai terjangkit *virus politik kartel*—dimana partai-partai berperilaku layaknya sebuah kartel yang, bergabung secara kolektif dalam satu kelompok dengan tujuan pragmatis, menjaga kelangsungan hidup partai lewat perburuan rente (*rent seeking*) sumber-sumber keuangan negara. Jika kedua virus

parpol ini dibiarkan, akibatnya tidak saja membahayakan nasib parpol itu sendiri namun juga sistem demokrasi secara keseluruhan. Diperlukan semacam vaksin yaitu aturan kepartaian dan pemilu yang bisa mengantisipasi penyakit yang ditimbulkan dua virus ini.

Kedua, Jurnal Politik Profetik oleh Abdis Mughis Mudhoffir dan Ceon Husain Pontoh dalam Sunardi (2020) yang berjudul “Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan”, menjelaskan bahwa perkembangan kapitalisme di Indonesia yang relatif masih terbelakang, membuat konfigurasi oligarki memiliki ciri yang tentu saja tidak serupa dengan apa yang telah diamati oleh pemikir oligarki di tempat lain. Dalam hal ini, Sunardi berupaya menyimpulkan bahwa oligarki di Indonesia bukan saja karena para konglomerat atau elit yang memiliki banyak pundi-pundi kekayaan, tetapi lebih dari itu, oligarki di Indonesia bisa eksis dan tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi sosial, yaitu adanya relasi kapital yang dominan. Situasi ini membuat para konglomerat punya ruang yang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik yang ada. Mudhoffir dan Coen menganggap jika oligarki di Indonesia bukan usang, tetapi perlu didekati dengan perspektif yang lebih kontekstual. Tawaran perspektif tentang oligarki yang relevan untuk konteks di Indonesia adalah mendekati oligarki yang berangkat pada tradisi Marxisme, melihat oligarki sebagai produk dari relasi kapital yang dominan. Dengan begitu, pendekatan konsep modernitas, *agency* maupun konsep-konsep lain seperti tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan transisi demokrasi relevan dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memperluas jejaring ekonomi dengan menempatkan konsep-konsep tersebut sebagai sub-ordinat dari faktor ekonomi.

Ketiga, Jurnal Penelitian Politik oleh Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodro Wibawa (2018) yang berjudul “Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas”, menjelaskan

bahwa dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai yang bertendensi politik kepeloporan dengan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan PRD dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orde Baru (Orba) yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan pasca-reformasi kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Penelitian ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Keempat, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik oleh Arif Novianto, dkk (2016) yang berjudul “Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri: Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani”, menguraikan krisis ekonomi yang menghantam Yunani pada tahun 2008 turut mengalir menjadi krisis politik. Oligarki politik lama yang sejak tahun 1974 sampai tahun 2010 bergantian menguasai Yunani yaitu partai PASOK dan partai *New Democracy* mengalami goncangan hingga munculnya dinamika politik baru. Kebijakan pengetatan anggaran dan reformasi neoliberal dibawah moderasi dari Troika (Bank Sentral Eropa, Uni Eropa dan *International Monetary Fund*) telah menciptakan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat serta membuat krisis ekonomi semakin membesar. Keadaan tersebut menciptakan ketidakpercayaan dari rakyat Yunani, sehingga mereka mencari sistem alternatif lain dari kapitalisme. Pada saat itu gagasan sosialisme yang diusung oleh Partai Syriza telah mampu mendapatkan pengaruh di basis massa, hingga mengantarkan Syriza memimpin pemerintahan dengan 36,3% (Persen) suara dalam pemilu 2015.

Penelitian ini mencoba mengelaborasi tentang strategi yang digunakan oleh Partai Syriza dan juga kelemahan dalam strategi tersebut.

kelima, Skripsi Penelitian oleh Putri Kristinawati (2013) yang berjudul “Peran Partai Bolshevik Dalam Revolusi 1917 Dibawah Pimpinan Vladimir Lenin”, menjelaskan bahwa Partai politik merupakan suatu wadah baru yang muncul di sekitaran abad ke 19, untuk menunjang hak politik dan aspirasi setiap individu politik. Partai politik telah menjadi kekuatan untuk membebaskan diri dari genggaman kaum feodal dan menjadi komponen yang membentuk pemerintahan. Di Rusia, kehadiran partai politik menjadi sangat penting dalam membebaskan masyarakat Rusia dari kaum feodal dan kaum borjuis kapitalis. Sejak awal munculnya partai politik (Partai Bolshevik) telah membawa perubahan baik dalam pola, taktik dan strategi pergerakan politik Rusia. Munculnya kekuatan-kekuatan politik seperti Bolshevik dan Menshevik telah membawa perubahan bentuk kekuasaan yang dahulunya dikuasai sistem feodalisme dan kapitalisme untuk mencapai Negara Sosialis Rusia. Salah satu kekuatan politik yang cukup besar perannya adalah Partai Bolshevik. Partai Bolshevik sebagai sebuah partai politik yang sangat berperan dan berpengaruh dalam pencapaian revolusi sosialis yang terjadi pada tahun 1917. Hal ini dapat dilihat dalam setiap pemberontakan untuk menentang sistem otokrasi kekaisaran Rusia dan menentang sistem borjuasi dan Pemerintahan Sementara yang menggantikan Tsar setelah dilaksanakannya revolusi tahap awal, sebagai jalan awal untuk meneruskan revolusi tahap kedua sehingga tercapai revolusi 1917 yaitu revolusi sosialis. Perannya dalam kedua revolusi ini dapat dilihat dalam meruntuhkan sistem feodalisme dan sistem kapitalisme yang tengah membudaya lama di Rusia. Dibawah pimpinan Vladimir Lenin, Peran Partai Bolshevik dalam masyarakat dan pemerintahan bukan hanya menghimpun massa yang banyak untuk melakukan pemberontakan. Namun, pada tulisan ini yang akan dilihat adalah: Peran Partai Bolshevik pada masa sistem feodalisme, Partai Bolshevik dan kaum borjuis bersatu untuk

melawan sistem otokrasi kuno Rusia yang telah menyengsarakan kaum petani yang memonopoli tanah mereka dan juga telah menyengsarakan kaum buruh, sedangkan masa sistem kapitalisme peran partai Bolshevik adalah menggantikan kaum borjuis yang telah menjabat menggantikan otokrasi Tsar untuk menuju revolusi sosialis (1917) agar tercipta masyarakat komunis yang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Bersama dengan Lenin, Partai Bolshevik mampu menjadi cermin bagi negara-negara lain untuk dengan teguh menjalankan ideologi Marxisme sehingga dapat tercapainya revolusi 1917. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan, meringkaskan dari berbagai kondisi yang timbul pada objek penelitian kemudian ditafsirkan secara deskriptif. Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori materialisme dialektika dari Karl Marx, terutama yang berkaitan dengan teori revolusi.

Keenam, Jurnal Penelitian oleh Firman Noor (2007) yang berjudul “KEGAGALAN PARTAI POLITIK MENARIK SIMPATI RAKYAT: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik”, tulisan ini mendorong partai politik untuk mempertimbangkan paradigma baru dalam menjalankan aktivitasnya di Indonesia saat ini. Dengan menekankan pentingnya kepedulian dan komitmen melayani rakyat, sebagai esensi dari paradigma baru partai politik, tulisan ini meyakini bahwa paradigma ini sebenarnya sejalan dengan semangat sejarah politik nasional dan pemahaman politik kontemporer. Tulisan ini memandang bahwa paradigma ini penting untuk mempererat hubungan antara rakyat dan partai politik juga, untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, yang pada akhirnya akan menjaga eksistensi demokrasi di Indonesia.

Ketujuh, Jurnal Penelitian oleh Firman Noor (2017) yang berjudul “Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya”, menguraikan bahwa di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia

memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *pasca demokrasi* itu sendiri merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch, Firman berupaya membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen, mengingat bahwa prestasinya meningkat seiring dengan semakin majunya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kedelapan, Jurnal Penelitian oleh Ridho Imawan Hanafi (2018) yang berjudul “Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019”. Tulisan ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih. Sebagian partai baru mengusung kekuatan milenial sebagai segmentasi pemilihnya. Tantangan partai baru salah satunya adalah kepemimpinan, yakni tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti program partai.

Kesembilan, Jurnal Penelitian oleh Aisah Putri Budiatri, dkk (2017) yang berjudul “Faksi dan Konflik Internal Partai-partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, memaparkan bahwa konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah

dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik, diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, kombinasi sistem proporsional terbuka, serta sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kesepuluh, Jurnal Penelitian oleh Moch Nurhasim (2013) yang berjudul “Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi”, menjelaskan bahwa pertumbuhan partai-partai politik di era reformasi cenderung mengarah pada partai yang tidak memiliki basis kelas (*class-based parties*). Partai yang tumbuh lebih mirip sebagai *catch all party*. Partai politik juga dibayang-bayangi oleh personalisasi yang dapat berasal dari orang yang berpengaruh atau orang kuat. Pengaruh personalisasi yang kuat menyebabkan masuknya unsur-unsur tradisional dalam struktur partai yang menyebabkan kelembagaan partai tidak berfungsi—bahkan hampir tidak memiliki institusi kelembagaan. Walaupun pengaruh tradisional tersebut dijadikan sebagai strategi dalam mendulang suara, dalam kenyataannya justru lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Kesebelas, Jurnal Penelitian oleh M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan (2020) yang berjudul “Hambatan dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilu Umum 2024”, memaparkan bahwa partai politik adalah kunci dari demokrasi. Peran mereka dalam mewujudkan demokrasi yang substansial, tidak hanya prosedural, amatlah penting. Di Indonesia, sejak runtuhnya rezim Orde Baru jumlah partai politik menjamur. Mulai pemilu

1999 hingga 2019, partai peserta pemilu di Indonesia selalu lebih dari 10 partai, bahkan sempat sebanyak 48 partai pada pemilu 1999. Fakta ini menunjukkan bahwa partai politik memang bagian integral dari berjalannya demokrasi di sebuah negara. Sayangnya, meningkatnya kuantitas partai di Indonesia belum sejalan dengan meningkatnya kualitas dari partai politik itu sendiri. Kita masih menemukan partai yang meninggalkan ideologinya demi kepentingan pragmatis, merekrut kader yang hanya memiliki uang dan popularitas, bahkan partai yang korupsi karena membutuhkan dana untuk mengarungi ketatnya pesta demokrasi di negeri ini. Dengan demikian, partai politik di Indonesia perlu berbenah. Partai tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan sesaat. Partai harus dikelola secara profesional agar menghasilkan kader-kader yang potensial untuk nantinya menduduki jabatan-jabatan publik.

Kedua belas, Buku yang ditulis oleh Nezar Patria dan Andi Arief (2015) yang berjudul “Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni”, mengungkapkan bahwa politik Orde Baru yang berakhir dengan kegagalan telah membawa bangsa ini dalam resiko ketidakpastian. Segala kekuatan politik kini berlaga untuk mendapat dukungan rakyat dan jika beruntung akan duduk dalam kekuasaan. Disisi lain tuntutan akan perubahan kini mengalir keras dari kekuatan radikal maupun moderat. Berhadapan dengan itu semua, penguasa harus berhitung waktu sambil memainkan kartu-kartu dukungan. Satu diantaranya adalah melestarikan gaya berfikir lama sambil berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Fungsinya jelas, untuk menurunkan derajat militansi dan menahan arus perlawanan. Dalam bahasa Gramsci, kegiatan diatas dinamai “hegemoni”. Suatu kegiatan politik yang berusaha meraih ketaatan spontan dari penduduk tanpa melalui perlawanan. Buku ini mengingatkan kita akan kukuhnya perlawanan yang, pada dunia politik tidak sepenuhnya berunsur pertarungan. Karena pada hakikatnya kekuasaan akan selalu punya taktik untuk terus menerus memperoleh dukungan dan sebaliknya kelompok tertindas tidak selalu berani melakukan

perlawanan. Rintisan perubahan yang radikal maupun gradual, tetap harus memperhitungkan taktik penguasa yang jelas-jelas ingin bertahan.

Ketiga belas, Skripsi Penelitian oleh Frumensius Mandur (2018) yang berjudul “Posisi Gerakan Kiri Dalam Ruang Demokrasi”, menjelaskan bahwa Penelitian ini berusaha untuk melacak posisi gerakan kiri di dalam ruang demokrasi. Gerakan yang disebut sebagai gerakan mengcounter terhadap wacana yang dominan yang sedang mengisi ruang demokrasi. Secara lebih dalam studi ini ingin melacak bagaimana gerakan *Social Movement Institute* (SMI) dalam mengcounter narasi besar yang dominan didalam ruang demokrasi.

1) Penilaian publik di Indonesia melihat gerakan kiri selalu dipandang sebagai komunisme.
2) Gerakan kiri selalau diidentikan dengan gerakan amoralitas dan kekejian hingga pada justifikasi gerakan radikal. *Statemen* dasar yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa demokrasi selalu diisi oleh setiap identitas apapun secara kontinue tanpa ada proses fiksasi dari negara. Hasil penelitian ini adalah menyajikan posisi dan upaya perlawanan yang dilakukan oleh gerakan kiri SMI terhadap wacana yang dominasi didalam ruang demokrasi. Inti dasar dari hasil penelitian ini adalah bahwa SMI sebagai gerakan demokrasi sudah mendapatkan tempat didalam ruang demokrasi di Indonesia. Namun upaya perlawanan yang dilakukan SMI selalu mengalami hambatan-hambatan tertentu dalam era demokrasi liberal yang, masih menjadi alat kontrol bagi kelas berkuasa dan hegemoni kapital yang dominan.

Keempat belas, Skripsi Penelitian oleh Hafidh Ayatillah As Syifa (2021) yang berjudul “PARTAI MURBA: Dalam Dinamika Revolusi dan Politik Indonesia (1948-1965)” menjelaskan bahwa Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana strategi perjuangan Partai Murba dalam perpolitikan di Indonesia dari pasca Proklamasi hingga menjelang akhir Demokrasi Terpimpin, serta dinamika Partai Murba dalam perpolitikan di Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Murba adalah sebuah

partai kader yang mulai berdiri pada tahun 1948, dengan seorang yang sangat berpengaruh dalam partai yaitu Tan Malaka. Sejak awal pembentukan partai, Partai Murba memosisikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan. Perkembangan demi perkembangan ditunjukkan dengan konsistensi dalam memegang teguh haluan sebagai partai kader. Memasuki Demokrasi Terpimpin, Partai Murba sempat bertransformasi menjadi Partai Massa karena adanya tuntutan secara kuantitas dari pemerintah. Rivalitas yang sudah terbentuk lama dalam perebutan pengaruh antara Partai Murba dan PKI, yang menyebabkan Partai Murba harus menelan pil pahit akibat propaganda yang dilakukan PKI ketika Partai Murba sedang berada di dalam BPS.

Dari uraian literatur review diatas, peneliti dapat mengelompokan bahwa secara umum terdapat tiga aspek yaitu: 1) Partai politik sebagai syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi tetapi memiliki kecenderungan yang pragmatis sebagai batu loncatan untuk meraih kekuasaan semata; 2) Partai-partai politik rentan terpengaruh oleh kepentingan kelompok oligarki guna mempertahankan dominasi modalnya melalui saluran-saluran politik sehingga ideologi partai ternegasi demi politik kartel; 3) Sistem demokrasi di Indonesia yang belum matang dan masifnya hegemoni kekuasaan yang mengerdikan eksistensi organisasi gerakan dan partai kiri berkembang di era reformasi, sehingga tidak adanya partai yang berbasis klas dari akar rumput dalam perhelatan politik elektoral dewasa ini.

Berangkat dari tiga poin diatas, peneliti bermaksud agar dapat meneliti lebih lanjut perihal kekosongan yang belum diungkapkan oleh sebagian peneliti terdahulu—sekali pun sudah ada yang menelitinya—tetapi terdapat perbedaan ruang dan waktu dengan konteks sekarang ini. *Pertama*, peneliti hendak meneliti lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pragmatisme partai politik saat ini dan melahirkan gagasan baru (*alternative*) partai politik yang tidak sekedar mengejar kekuasaan semata, tetapi dapat

menjalankan fungsi-fungsi partai sebagaimana mestinya dan memiliki prinsip perjuangan yang konsisten untuk mengartikulasikan kepentingan massa rakyat. *Kedua*, peneliti hendak meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi oligarki saat ini dalam tubuh partai politik dan bagaimana mengakhirinya—yakni perlu adanya partai alternatif yang memiliki ideologi dan sistem partai yang lebih jelas (berwatak kerakyatan), sehingga dapat mengakomodir kepentingan akar rumput—sebagai *antitesa* dari sistem partai borjuasi dewasa ini. *Ketiga*, peneliti hendak meneliti lebih lanjut terkait permasalahan demokrasi di Indonesia yang membuat organisasi gerakan kiri kesulitan membangun partai politiknya sendiri yang berbasis kelas di akar rumput, yakni meneliti lebih lanjut mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi beserta harapan (cita-cita) yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi gerakan kiri di era demokrasi liberal saat ini—sehingga lahirnya suatu partai politik alternatif sebagai kekuatan oposisi yang merepresentasikan kepentingan massa rakyat dalam melawan dominasi partai dan elit politik borjuasi (oligarki-neoliberalisme).

F. Kerangka Konseptual

1. Agenda Setting

Teori penentuan atau pengaturan agenda (*agenda setting*), secara teoritis menyebutkan bahwa media massa ataupun organisasi sosial memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik terhadap suatu issue serta dapat membuatnya menjadi penting⁵. Agenda setting juga populer menjadi landasan untuk membantu menjelaskan fenomena sosial secara signifikan dalam membentuk persepsi publik. Dalam konteks politik, maka *agenda setting* secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses dalam

⁵ <https://www.glngirwn.com/blog/teori-pengaturan-agenda/>.

merumuskan dan menentukan keputusan politik tertentu—baik berupa kebijakan maupun program—melalui beberapa tahapan dan syarat tertentu. Artinya, dalam merumuskan suatu konsep tertentu, maka para aktor perumus perlu untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada beberapa hal seperti permasalahan, peristiwa, *issue* yang berkembang, konteks ruang dan waktu tertentu, dan lain-lain. Sehingga dalam penentuan keputusan, kebijakan dan program tertentu dapat sesuai dengan tergetan maupun parameter yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Sebab, ada banyak situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi persepsi publik, sehingga membutuhkan pemilahan untuk menentukan skala prioritas dan relevansi atas sesuatu yang hendak dilakukan oleh seseorang maupun kelompok.

Menurut Davies dalam Utami Dewi (2013), menjelaskan bahwa terdapat tiga fase dalam proses agenda setting, yakni bermula dari masalah publik yang menghasilkan tuntutan akan adanya tindakan (intervensi) tertentu; kemudian tuntutan masyarakat yang dimanifestasikan menjadi suatu *issue*; dan *issue* dirubah menjadi salah satu item agenda pemerintah⁶. Hal tersebut jika dikaitkan dengan upaya pembangunan partai massa rakyat, maka inisiatif pembangunan partai alternatif tersebut juga berdasarkan tuntutan-tuntutan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi *issue* politik. Oleh karenanya, dalam konteks pembentukan partai politik alternatif, maka proses *agenda setting* yang perlu dilakukan setidaknya meliputi strategi-taktik (*stratak*) agar partai yang hendak dibentuk dapat diketahui oleh massa luas dan dapat membentuk opini publik melalui kampanye atau propaganda; bagaimana suatu organisasi dapat membuat *framing issue* agar partai

⁶ <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/AGENDA+KEBIJAKAN>.

alternatif tersebut bisa menjadi populer ditengah masyarakat; dan menentukan berbagai agenda untuk mencapai target-target tertentu.

2. Partai Politik

a) Pengertian Partai Politik

Partai Politik atau Parpol sejak zaman kolonialisme Belanda sudah bermunculan di Tanah Air. Namun keberadaan parpol pada saat itu belum diatur secara Undang-undang maupun bentuk aturan lainnya. Dapat kita artikan bahwa keberadaan parpol sebelum kemerdekaan masih bersifat Organisasi Sosial Politik (Orsopol), yang bercita-cita pembebasan nasional dengan langgam perjuangan yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Artinya, pada saat itu partai-partai politik tidak berkontestasi dalam pemilu untuk perebutan kekuasaan. Sebab hukum kolonial saat itu tidak memberikan kebebasan politik untuk rakyat pribumi. Namun dalam dinamikanya, dengan berbagai pembacaan situasi saat itu, kemudian memicu lahirnya parpol sebagai kendaraan perjuangan massa rakyat melawan penjajah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, cikal-bakal pengakuan atas keberadaan partai politik merujuk pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dalam UUD 1945 memang tidak dijumpai pasal atau pun ayat yang secara khusus mengatur tentang partai politik, namun bunyi pasal 28E ayat (3) telah mencerminkan hak warga negara dalam kehidupan politik—termasuk dalam membentuk partai sebagai kendaraan politiknya. Selanjutnya, untuk menciptakan ruang demokrasi yang efektif dan efisien, dibutkannya Undang-undang tentang partai politik. Dalam dinamikanya, UU tentang partai politik pun mengalami perubahan demi perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan relevansi politik di Indonesia. Setidaknya terjadi tiga kali

perubahan UU partai politik di tanah air, hingga yang terakhir dan masih berlaku sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (perubahan atas UU No.2 Tahun 2008).

Dalam UU No. 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebabnya partai politik sudah tidak lagi asing dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Secara etimologis, Maurice Duverger dalam Budiardjo (2015) menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin pars yang berarti “bagian”. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie (2008), menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris part yang berarti “bagian atau golongan”. Artinya kata partai merupakan bagian atau golongan yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan tertentu seperti ideologi, tujuan, agama dan bahkan kepentingan. Sedangkan kata politik secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti “kota atau komunitas” secara keseluruhan. Plato (2018) dalam bukunya “Republik” menjelaskan bahwa, konsep polis adalah terciptanya masyarakat yang ideal. Artinya politik ialah segala usaha dan aktifitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Kemudian Aristoteles (2017) dalam bukunya yang berjudul “Politik” menerangkan bahwa, manusia adalah binatang politik (Political Animal). Artinya bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia. Maka secara umum

dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu bagian atau golongan yang dikelompokan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik—yang disesuaikan dengan pikiran dalam diri setiap anggota partai politik.

Dalam perkembangannya, banyak para ahli politik kemudian mendefenisikan partai politik dengan beragam sudut pandang. Berikut pengertian partai politik menurut para ahli:

Menurut Giovanni Sartori dalam Budiardjo (2015), mengatakan sebagai berikut:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemelihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Kemudian, Menurut Sigmund Neumann dalam Budiardjo (2015), berpandangan sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda .

Selanjutnya, Miriam Budiardjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, mengemukakan bahwa:

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—(biasanya) dengan cara konstitusional— untuk melaksanakan programnya

Lebih lanjut, Koirudin (2015) dalam bukunya yang berjudul “Partai Politik Dan Agenda Transformasi Demokrasi”, berpendapat sebagai berikut:

Partai Politik adalah organisasi yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal ini bahwa keberadaan partai politik sejatinya benar-benar diperlukan oleh masyarakat dan bukan sekedar berkerja dalam konteks perebutan kekuasaan semata. Artinya partai politik merupakan pelaksana pemerintah yang “tersembunyi”—dimana keberadaannya mempengaruhi ragam kebijakan yang dikembangkan. Karena itu bisa dikatakan bahwa kegagalan sekaligus keberhasilan suatu pemerintahan dalam melayani dan memakmurkan masyarakat adalah kegagalan dan keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya secara efektif .

Begitu juga dengan Ramlan Surbakti (2010), dalam bukunya yang berjudul “Memahami Ilmu Politik”, menyatakan sebagai berikut:

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah .

Berangkat dari pandangan para tokoh yang peneliti uraikan diatas, maka dapat pula disimpulkan, bahwa secara umum memiliki kesamaan pandangan mengenai

partai politik—dimana partai politik merupakan sebuah pranata sosial, yang menghubungkan kesamaan pemikiran dan tindakan politik (kepentingan) setiap individu atau anggota masyarakat dalam satu kerangka bersama, yang terorganisir, terdidik dan dipimpin secara sistemik. Selanjutnya, untuk merealisasikan kehendak bersama dalam sebuah partai politik, maka tentunya akan dipandu oleh program, platform, nilai-nilai dan ideologi tertentu—yang memungkinkan setiap individu menjadi terikat yakni, memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab bersama.

Bagi peneliti, dengan demikian—maka tugas, fungsi dan peran suatu partai politik dapat direalisasikan secara efektif oleh setiap individu anggotanya. Namun dalam praktiknya dilapangan, banyak kecenderungan yang dapat kita amati bersama bahwa—pemikiran, sikap dan tindakan anggota atau kader—tidak selaras dengan program, nilai dan ideologi partai politik yang mereka yakini. Sebab, kekacauan cara pandang massa rakyat terhadap partai politik masih menjamur hingga saat ini, dimana partai politik secara sempit hanya dipandang sebagai alat atau kendaraan politik dalam perebutan kekuasaan semata. Kondisi inilah yang, pada gilirannya mengakibatkan elit-elit politik dan partai politik borjuasi sekarang ini bertindak diluar peran dan fungsi partai yang sesungguhnya.

b) Fungsi Partai Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi, sejatinya partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yakni sebagai wahana bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan memperjuangkan kepentingannya. Berikut ini adalah fungsi partai dalam konteks negara demokrasi.

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Singkatnya, komunikasi politik bertujuan untuk menggabungkan dan merumuskan ragam pendapat dan aspirasi (kepentingan) yang senada dalam bentuk yang lebih teratur. Bagi Miriam Budiardjo (2015), hal tersebut merupakan bagian dari bentuk agregasi dan artikulasi dalam fungsi komunikasi partai politik. Baginya, tindak lanjut dari pada itu akan menjadi usul kebijakan. Lebih lanjut ia menerangkan sebagai berikut:

Setelah partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan, ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (goal formulation) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy)⁷.

Bagi peneliti, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik dapat memainkan peranan sebagai perantara, yang menjembatani dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam perumusan kebijakan umum. Artinya partai politik bertindak sebagai komunikator yang menghubungkan pemerintah dan rakyat dalam kehidupan bernegara di era demokrasi sekarang ini. Sejalan dengan Sigmund Neumann (1963), ia mengatakan bahwa partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi, dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas⁸.

2) *Sebagai Sarana Sosialisasi Politik*

⁷ *Ibid*, hlm 406.

⁸ *Ibid*, hlm 352.

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik kepada anggota masyarakat. Hal tersebut dapat diterapkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal. Sedangkan secara tidak langsung dapat pula dilakukan melalui praktik kehidupan sehari-hari dalam keluarga, tetangga dan bermasyarakat. Menurut Ramlan Surbakti (2010), dalam segi penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik⁹. Singkatnya, menurutnya pendidikan politik dimaksudkan agar anggota masyarakat dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik; Bentuk penyampaian pesannya bisa berupa kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Sedangkan indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap oleh pihak berkuasa sebagai yang ideal dan baik.

3) Sebagai Sarana Pemandu Kepentingan

Indonesia merupakan negara yang majemuk, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa didalam masyarakat terdapat beragam kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat personal maupun berdasarkan kelompok dalam masyarakat. Dengan banyaknya kepentingan dalam masyarakat, maka partai politik pun diperlukan untuk

⁹ *Ibid*, hlm 150.

memainkan peranan sebagai pemandu kepentingan tersebut. Sebab kepentingan-kepentingan tersebut bisa saja memiliki kesamaan antara satu dan yang lainnya maupun saling bertentangan. Disinilah partai politik berfungsi untuk menjembatani setiap perbedaan kepentingan yang muncul, sehingga dapat menemukan benang merahnya yang mampu mengakomodir semua kepentingan tersebut menjadi satu kesatuan, kepentingan bersama yang kemudian ditransformasikan menjadi kepentingan umum. Dalam hal ini, Ramlan Surbakti (2010) menulis:

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan pelbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi pelbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.¹⁰

Dari uraian diatas, peneliti hendak memetakan sejauh mana partai politik yang ada dewasa ini mampu mengakomodir atau memandu setiap kepentingan dalam masyarakat. Dalam prakteknya, bagi peneliti, posisi partai saat ini dalam mengartikulasikan ragam kepentingan dalam masyarakat mengalami kecenderungan yang berat sebelah atau berpihak pada suatu kepentingan tertentu. Hal tersebut dapat kita buktikan, ditengah dominasi kelompok oligarki dalam ranah politik nasional, juga menyebar di partai-partai yang ada—pada gilirannya proses pengambilan keputusan (kebijakan) politik senantiasa mewakili kepentingan dari kelompok oligarki itu sendiri, yang pada akhirnya mengabaikan kepentingan dan

¹⁰ *Ibid*, hal 152.

mengorbankan nasib massa rakyat lainnya. Sementara dalam banyak hal, massa rakyat cenderung menggantungkan nasibnya agar diperjuangkan oleh kader-kader partai politik di parlemen dalam merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Inilah sebabnya.

4) *Sebagai Sarana Partisipasi Politik*

Partisipasi politik adalah suatu proses yang melibatkan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan suatu negara. Ramlan Surbakti (2010), menjelaskan kegiatan dalam partisipasi politik sebagai berikut:

Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.¹¹

Kemudian, lebih lanjut, dalam hal demokrasi tentu saja akan melibatkan partisipasi luas dari massa rakyat. Pemilu misalnya, setiap partai politik kemudian berperan untuk melakukan mobilisasi massa (terkadang memberikan pendidikan politik) dengan caranya yang bermacam-macam (salah satunya kampanye), tetapi memiliki kesamaan budaya politik—yang terus berkelindan dari dulu hingga sekarang—seperti politik transaksional. Dengan demikian, cukup sulit untuk mengidentifikasi

¹¹ *Ibid*, hal 151.

wakil rakyat yang representatif. Riswanda Imawan (1998) dalam bukunya “Membedah Politik Orde Baru), menerangkan bahwa:

Pemilu diyakini sebagai sarana yang paling demokratis (dalam artian formal) untuk memilih elit politik. Karena sifatnya yang demokratis, maka kegiatan Pemilu selamanya mengikutsertakan mayoritas penduduk yang berhak memilih. Dalam Pemilu para pemilih bisa bebas menentukan siapa yang dipilih, dan para calon elit juga bebas mengumbar janji untuk menarik massa sebanyak mungkin. Namun perlu diingat bahwa pemilu juga berfungsi sebagai sarana pelepasan “uneg-uneg”, sebagai saluran sebelum persoalan-persoalan sosial dan politik muncul ke permukaan dalam bentuk konflik. Akan tetapi, apapun bentuk partisipasinya, belum tentu membantu rakyat memecahkan masalah untuk memilih wakil yang betul-betul mewakili kepentingan mereka. Sebab, siapa yang akan dipilih oleh rakyat adalah elit-elit politik yang sudah disiapkan dan dimasukkan dalam daftar calon dari setiap partai politik.¹²

Berangkat dari pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka porsi partisipasi massa rakyat dalam proses politik akan lebih luas. Namun bagi peneliti, dalam perkembangannya saat ini—ditengah menguatnya dominasi politik kaum oligarki di Indonesia—justru muncul kecenderungan yang hanya melibatkan partisipasi politik massa rakyat disaat-saat tertentu, misalnya untuk pemilihan umum semata. Tetapi masalahnya, rakyat bahkan tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan wakilnya yang betul-betul representatif—selain ia (rakyat) hanya akan memilih—dari pilihan yang sudah

¹² Riswanda Imawan. “*Membedah Politik Orde Baru*”. (1998), hlm 3-4.

disediakan dan dicalonkan oleh partai politik. Hal tersebut tentu akan mencederai esensi mendasar dari partisipasi politik yang dimaksudkan, yakni keterlibatan massa rakyat dalam proses Pemilu (hak memilih dan dipilih), hingga pada proses perumusan, pelaksanaan dan kontrol terhadap kebijakan umum. Dalam banyak hal, kebijakan umum yang lahir justru bertolak belakang dengan kepentingan massa rakyat dan cenderung berpikak pada kepentingan kaum borjuasi-oligarki. Baru-baru ini misalnya, DPR dan Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, jutaan massa rakyat termasuk kaum buruh dan tani menolak adanya UU tersebut dengan gelombang demonstrasi yang meluas diberbagai daerah, karena dinilai UU tersebut tidak memiliki keberpihakan yang jelas terhadap massa rakyat dan hanya memberi karpet merah untuk kepentingan pemodal. Dalam hal ini, DPR yang merupakan perwakilan dari partai-partai politik pemenang Pemilu (bukan representasi rakyat), tidak mengakomodir kepentingan dan tuntutan dari massa rakyat di akar rumput. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa partai yang ada saat ini telah “terkartelisasi” dengan kepentingan kelompok oligarki dan mengorbankan nasib jutaan rakyat Indonesia.

5) *Sebagai Sarana Rekrutmen Politik*

Partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik karena memainkan peranan untuk memilih dan mengangkat seseorang atau sekelompok orang dari warga masyarakat, untuk terlibat dalam sistem politik pada umumnya dan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan secara khusus. Artinya, partai politik yang telah merekrut beberapa perwakilan (anggota) yang berkualitas—bahkan yang memiliki popularitas dari kelompok masyarakat tertentu—kemudian memainkan peranan untuk menyeleksi dan merekomendasikan siapa yang layak ikut dalam sistem politik dan pemerintahan. Koirudin (2015) menjelaskan:

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. ...Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).¹³

Berangkat dari uraian diatas, maka bagi peneliti, partai politik memiliki peran dan fungsi yang penting dalam proses perkembangan politik dan pemerintahan disuatu negara, lebih-lebih dalam negara demokrasi, seperti Indonesia. Namun karena kaitannya dengan sistem politik, maka sistem rekrutmen politik pun diorientasikan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan—yang oleh Imawan (1998) dapat pula menggunakan sistem “*Vote Getter*”—dimana tokoh yang dimasukkan dalam daftar calon tetapi sesungguhnya mereka tidak akan duduk di lembaga legislatif. Tujuannya jelas, hanya hendak merangkul suara massa sebanyak mungkin; sekalipun penggunaan *Vote Getter* ini jelas-jelas membohongi rakyat¹⁴. lebih lanjut, karena kaitannya dengan kekuasaan, maka praktik kolusi dan nepotisme pun menjamur dalam sistem politik dan pemerintahan dewasa ini. Sebab, politik tidak lain merupakan usaha-usaha untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dari sekelompok masyarakat—biasanya dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui sistem Pemilu—dengan demikian memiliki kendali dan dapat

¹³ *Ibid*, hal 99.

¹⁴ *Ibid*, hlm 5.

memegang keputusan tertinggi dalam mengelola dan menjalankan peran negara. Artinya, jika sistem politik telah didominasi oleh kepentingan kaum oligarki, maka yang berkesempatan untuk mengisi dan menduduki jabatan atau posisi strategis dalam suatu negara adalah elit-elit politik borjuasi—sebagai representasi dari kelompok oligarki itu sendiri.

6) *Sebagai Sarana Kontrol Politik*

Fungsi kontrol politik di negara demokrasi seperti Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan masyarakat. Ramlan Surbakti (2010) menjelaskan:

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif obyektif. ...Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus.¹⁵

Berangkat dari penjelasan diatas, bagi peneliti, fungsi partai politik sebagai sarana kontrol politik menjadi sangat penting di Indonesia. Sebab, dengan adanya kontrol kebijakan dari partai politik, maka kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah—yang dapat merugikan rakyat—setidaknya dapat dibatasi dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Selain itu, partai politik juga dapat

¹⁵ *Ibid*, hal 154.

melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan pemerintahan agar berjalan baik sebagaimana mestinya.

7) *Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik*

Konflik yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, mencakup beragam aspek dalam kehidupan sosial masyarakat. Setidaknya, kita dapat melihatnya dari sudut pandang demokrasi—setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya, sehingga konflik pun sulit dihindari karena perbedaan pandangan dan kepentingan dan pada gilirannya dapat menimbulkan varian konflik lainnya. Disinilah fungsi partai diperlukan sebagai instrumen yang juga dapat mengendalikan konflik melalui penyelesaian dalam bentuk keputusan politik. Ramlan Surbakti (2010) menulis:

Partai politik sebagai lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan pelbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian yang berupa keputusan itu, diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil, rakyat yang berasal dari partai-partai politik.¹⁶

Berangkat dari uraian diatas, yang hendak digaris bawahi oleh peneliti ialah bahwa konflik tidak hanya tercipta diantara masyarakat (bersifat horisontal), melainkan juga tercipta antara pemerintah atau korporasi yang disokong oleh negara itu sendiri kemudian berkonflik dengan massa rakyat (bersifat vertikal). Bagi

¹⁶ *Ibid*, hlm 153.

peneliti, dalam banyak hal, konflik yang bersifat vertikal inilah justru partai politik absen dalam penyelesaiannya, melakukan pembiaran dan terkadang justru mendukung pemerintah dan korporasi.

Dari beberapa uraian mengenai fungsi partai politik diatas, kita dapat menemukan dinamika parpol, bahwa fungsi-fungsi tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Bagi peneliti, hal tersebut terjadi karena kurangnya kehendak politik (*political will*) dari masing-masing kader partai itu sendiri—sebagai penggerak partai. Namun disisi lain, kembali lagi pada masalah “representasi”—yang menurut Imawan (1998), *masalah utama yang perlu diselesaikan adalah bagaimana memilih wakil rakyat yang “asli”, yang “matang di pohon”, bukan yang karbitan*¹⁷. Dengan demikian, agenda mendesak yang perlu segera dilakukan oleh massa rakyat adalah bagaimana menciptakan embrio pembangunan partai yang benar-benar dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagaimana mestinya. Sebab, fungsi-fungsi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosio-politik masyarakat. Selain itu, kita juga dapat melihat, bagaimana partai politik di Indonesia yang ada dewasa ini, hanya berfungsi untuk perebutan dan mempertahankan kekuasaan semata dan menegasikan fungsi lainnya.

c) *Pelebagaan Partai Politik*

¹⁷ *Ibid*, hlm 7.

Dalam konteks negara demokrasi, keberadaan partai politik merupakan suatu hal yang penting karena dapat memainkan peranan untuk menjembatani pemerintahan (kekuasaan) dan warga negara dalam proses politik. Oleh karenanya, tidak asing lagi apabila individu masyarakat kemudian mengintegrasikan dirinya dalam sebuah partai politik berdasarkan kepentingannya masing-masing. Tetapi dilain sisi, masyarakat yang merasa kepentingannya belum terwakilkan kemudian berinisiatif untuk membentuk partai politik baru—sebagai partai politik alternatif yang merupakan antitesa dari partai politik sebelumnya atau yang ada saat ini—seperti yang dilakukan oleh organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat saat ini, yakni mengupayakan pembangunan partai massa rakyat. Oleh karenanya, peneliti kemudian hendak menganalisis proses pelebagaan partai politik alternatif tersebut untuk melihat sejauh mana prospek partai kedepannya.

Menurut Huntington dalam Pamungkas (2011), Pelebagaan merupakan proses dalam organisasi melalui tata cara tertentu (prosedur) untuk memperoleh nilai baku dan stabil¹⁸. Begitu juga dengan Randall dan Lars (2002), pelebagaan diartikan sebagai proses dimana partai menjadi stabil (mantap, kokoh dan kuat) dalam hal pola perilaku yang terintegrasi maupun dalam hal sikap (*attitude*) dan budaya¹⁹. Menurut Randall dan Lars (2002), dalam pelebagaan partai politik terdapat beberapa aspek, yakni aspek internal – eksternal dan aspek struktural – kultural. Dalam hal ini, Aspek internal partai merupakan aspek yang berasal dari

¹⁸ Sigit Pamungkas. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

¹⁹ Vicky Randall dan Svasand Lars. (2002). Party Institutionalisation in New Democracies. *Party Politics*, 34 (1).

dalam partai, sedangkan aspek eksternal merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan antara partai dengan masyarakat maupun dengan lembaga lainnya. Kemudian, aspek struktural yaitu aspek yang berkaitan dengan struktur yang berada di dalam partai, sedangkan aspek kultural berkaitan dengan nilai sosial-budaya yang berkembang di dalam masyarakat.

Lebih lanjut, dalam proses pelembagaan partai politik, Randall dan Lars (2002) kemudian merumuskan 4 dimensi yang dapat dijadikan pisau analisis yaitu:

1) Dimensi Kesisteman

Dimensi ini merupakan persilangan dari aspek internal dan struktural. Dimensi kesisteman menjelaskan mengenai fungsi-fungsi partai politik (fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, pemandu kepentingan, kontrol politik dan pengendalian konflik). Indikator terciptanya dimensi ini adalah sistem yang berlaku di dalam tubuh partai politik yang berkaitan dengan berjalannya aktivitas partai, yakni meliputi aktor/elit yang paling memiliki pengaruh dominan baik dalam menentukan keputusan maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan partai politik; kemudian pola pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik menjadi tolak ukur yang mencerminkan kesisteman dari partai tersebut; serta sistem yang diterapkan oleh partai politik dalam memelihara hubungan dengan anggota/kader dan simpatisan bersifat klientisme atau berdasarkan konstitusi partai.

2) Dimensi Identitas Nilai (value infusion)

Dimensi ini merupakan hasil persilangan dari aspek internal dengan aspek kultural. Kemudian dimensi ini berkaitan dengan identitas sebuah partai politik yang berdasarkan pada ideologi partai. Indikator dari dimensi identitas nilai

adalah hubungan partai politik yang berkaitan dengan kelompok tertentu, yakni ketergantungan partai politik dengan dengan kelompok sosial tertentu. Kemudian pengaruh klientisme dalam organisasi, dimana dalam hubungan antara partai dengan anggota/kader bersifat instrumentalis (didasarkan pada materi) maupun bersifat ideologis (berdasarkan ideologi yang diterapkan oleh partai).

3) *Dimensi Otonomi (decisional autonomy)*

Dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan merupakan hasil dari persilangan aspek eksternal dengan aspek struktural. Indikator terciptanya dimensi otonomi adalah dalam pembuatan keputusan oleh partai politik berkaitan antara hubungan partai dan aktor luar partai (pengusaha, pemerintah, ormass, dll). Hubungan partai dengan pihak luar partai tersebut bersifat saling ketergantungan atau ada salah satu pihak yang mendominasi.

4) *Dimensi Citra Publik (reification)*

Dimensi citra publik terhadap suatu partai politik merupakan persilangan dari aspek eksternal dengan aspek kultur. Indikator dari dimensi pengetahuan publik tentang partai politik adalah pada keberadaan partai yang berada di tengah publik sudah melekat pada pengetahuan masyarakat atau sebaliknya masyarakat belum mengetahui partai politik tersebut. dalam hal ini, keberadaan partai politik merupakan aspek yang penting dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik dapat menyesuaikan aspirasi, harapan, sikap maupun perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik melihat proses pelebagaan partai politik alternatif yang sedang digagas oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat, yakni partai

massa rakyat. Sebab, semakin meningkatnya kebebasan politik di Indonesia salah satunya ditandai dengan kelahiran partai-partai politik baru, yang dalam banyak hal selalu datang dengan gagasan sebagai antitesa dari partai-partai lama yang dianggap gagal melakukan fungsi-fungsi perantara (*intermediari*). Tentu saja, masing-masing partai politik berusaha muncul dipermukaan untuk memainkan peranan dalam mengonstruksi kesadaran publik dengan berbagai pola pembingkaihan isu (*framing issue*) guna menarik simpati rakyat. Oleh karenanya, bertolak dari keempat dimensi pelembagaan partai politik di atas, dapat menjadi alat ukur bagi peneliti dalam meneropong upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat.

3. Perspektif Marxisme Sebagai Politik Alternatif

Pada umumnya wacana politik marxisme bertitik tolak dari dasar pemikiran Karl Marx (1818-1883) dalam membaca perkembangan masyarakat. Kemudian para pengikutnya disebut sebagai kaum *marxist* (marxis), yang tentu saja turut mengembangkan aliran Sosialisme Ilmiah dan bahkan Komunisme. Namun aliran sosialisme sejatinya sudah berkembang sebelum Karl Marx menyusun suatu teori sosial yang berdasarkan hukum-hukum ilmiah, yang bisa dipraksiskan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Akan tetapi Karl Marx berbeda dengan para cendekiawan sebelumnya seperti Robert Owen di Inggris (1771-1858), Saint Simon (1760-1825) dan Fourier (1772-1837) di Prancis²⁰, pemikiran mereka dalam melihat masalah sosial hanyalah didorong oleh rasa kemanusiaan tanpa disertai dengan tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi revisi: Cetakan kelima, 2015), hlm 140.

mengenai tujuan dan strategi memperbaiki suatu keadaan. Karena itu, teori-teori mereka dianggap sebagai angan-angan belaka dan mereka disebut sebagai kaum Sosialis Utopis. Menurut Miriam Budiardjo (2015), “untuk membedakan ajarannya dengan gagasan-gagasan sosialis utopi, ia (Karl Marx) menamakan ajarannya sebagai Sosialisme Ilmiah (*scientific socialism*)”.

Dalam menyusun teori perkembangan masyarakat, Marx mewarisi dan menggali ajaran “revolusi dan Sosialisme” dari Perancis, “ekonomi-politik” dari Inggris, dan secara filosofis akar dari ide-ide Karl Marx ditambah langsung dari “tradisi kefilsafatan Jerman”. Marx juga dipengaruhi oleh gagasan Georg W.F. Hegel (1170-1831) tentang konsep pemikiran “dialektik” dan Ludwig A. Feuerbach (1804-1872) tentang corak pemikiran yang bersifat “materialisme”²¹. Singkatnya, konsep dialektik yang dikembangkan Hegel pada umumnya terdiri atas tiga unsur yaitu “*tesis, sintesis* dan *antitesis*”—dimana proses dari tesis sampai antitesis berada dalam keadaan bertentangan, bergerak dan berkembang serta saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan konsep materialisme Feuerbach adalah berlawanan dengan idealisme Hegel, bahwa menurutnya keberadaan alam bukanlah cerminan dari ide, melainkan “ide yang merupakan cerminan dari alam”—dimana hakikat dari seluruh realitas termasuk manusia dan hidupnya terletak pada alam.

Berangkat dari rumusan filsafat kedua tokoh tersebut, kemudian Karl Marx bersama sahabatnya Friedrich Engels (1820-1895), membentangkan konsepnya sendiri tentang “Materialisme Dialektik dan Materialisme Historis” atau MDH. Selanjutnya, Marx dan

²¹ Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx* (LkiS Yogyakarta: 2013), hlm 57.

Engels kembali mengkritik Hegel karena konsep dialektiknya hanya terletak pada pikiran (ide) belaka bukan dalam tindakan praktis; sedangkan menurut Marx ide itu tidak lain daripada dunia materiil yang dicerminkan oleh otak manusia, dan diterjemahkan dalam bentuk pikiran. Begitu juga konsep materialisme Feuerbach, yang dinilai masih sangat vulgar, abstrak dan kontemplatif yang mengabaikan aktivitas praktis—revolusioner. Menurut Karl Marx (1845) dalam tulisannya yang berjudul “Tesis Tentang Feurbach”, yang diterbitkan oleh Engels (1888) sebagai lampiran pada edisi yang tersendiri dari karyanya tentang “Ludwig Feuerbach”, Marx menyimpulkan pada tesisnya yang kesebelas bahwa:

“Para ahli filsafat hanya telah *menafsirkan* dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah *mengubahnya*”.

Disini Marx mengkritik filsafat sebelumnya, yang kuno, termasuk filsafat Feurbach, bahwa kecenderungan filsafat mereka hanya hebat menafsirkan dunia. Sedangkan bagi Marx, yang terpenting adalah mengubahnya dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Inilah yang membedakan Marx dengan para filsuf sebelumnya maupun sezamannya, dan bahkan gagasannya hingga masa kontemporer masih relevan dan layak dikaji kembali sebagai diskursus—dalam gerak perjuangan perubahan itu sendiri. Dalam perkembangannya, filsafat MDH Marx inilah yang kemudian menjadi karya tersohor dikalangan kaum *marxist*—sebagai pisau analisa dalam pembacaan situasi ekonomi-politik, dan sekaligus menjadi pedoman yang mempersenjatai klas pekerja (kaum proletariat) melalui perjuangan revolusi.

a) Materialisme Dialektik (*dialektical materialism*)

Pada dasarnya bertitik tolak dari materi sebagai satu-satunya kenyataan. Karl Marx mengartikan Dialektika Materialisme sebagai keseluruhan proses perubahan yang

terjadi terus menerus tanpa ada yang mengantarai. Dari proses itu kemudian timbul kesadaran melalui proses pertentangan. Materi yang dimaksud sebagai sumber keberadaan benda-benda alamiah, senantiasa bergerak dan berubah tanpa henti-hentinya. Dalam pergerakan dan perubahan itu terjadi perkembangan menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi. Tidak melalui proses yang lamban (evolufif), tetapi secara dialektis yaitu melalui pertentangan-pertentangan yang pada hakikatnya sudah mengandung benih perkembangan itu sendiri. Menurut Andi M. Ramly (2013), menyatakan bahwa:

proses aksi dan reaksi di dalam alam dapat diterangkan sebagai manifestasi dari gerakan materi yang berdialektis. Dengan kata lain, dialektika materialisme tidak lain adalah sejarah perkembangan alam berdasarkan benih yang hadir dari kekuatan yang ada pada dirinya.

Kemudian, menurut D.N. Aidit (1963) dalam karyanya yang berjudul “Tentang Marxisme”, menerangkan bahwa:

Materialisme dialektik Marx memandang dunia materil ini bukan suatu tumpukan gejala-gejala yang terjadi secara kebetulan saja, tiada hubungan tertentu, terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang organik, dimana segala gejala memiliki salinghubungan secara organik. Misalnya, kehidupan masyarakat manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan alam disekitarnya, satu sama lain mempunyai hubungan tertentu dan salinghubungan antara manusia dengan alam akan mempengaruhi dan menentukan pula salinghubungan manusia yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat; dan semua itu akan mempengaruhi dan menentukan

pula alam pikiran manusia. Dengan demikian, gejala-gejala alam, masyarakat dan pikiran terjalin dalam satu hubungan yang organik²².

Pada dasarnya, apa yang dimaksudkan oleh Ramly dan Aidit diatas meyakini bahwa dunia materiil adalah satu kesatuan yang organik, yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Dimana antarhubungan tersebut akan menjadi saling bergantung, saling mempengaruhi dan saling menentukan satu sama lain. Dalam mengakui dunia materiil ini sebagai suatu kesatuan yang organik, tidak cukup jika hanya mengakui adanya salinhubungan antara gejala-gejala, tetapi yang penting ialah mengakuinya sebagai suatu hukum yang obyektif berdasarkan syarat-syarat keilmiahan tertentu. *“...bukan tekanan atau buatan manusia secara subyektif, bukan juga sebagai perwujudan dari kemauan atau keinginan (ide absolut) dan sebagainya. Hal ini justru merupakan suatu ciri yang membedakan dialektika Marx yang materialis dengan dialektika Hegel yang idealis”*. (D.N. Aidit: 1963).

Dialektika juga ditentukan oleh keadaan, ruang dan waktu tertentu. Dimana makna dari suatu hal ditentukan oleh keadaan atau situasinya. Artinya, jika situasinya berubah, maka makna dari suatu hal tersebut juga akan berubah. Misalnya, lahirnya kapitalisme ditentukan atas dasar adanya kapital dan disisi lain tersedianya buruh-buruh upahan, dimana syarat ini baru terdapat pada akhir fase feodal di Eropa yakni keruntuhan feodalisme di Perancis dan revolusi industri di Ingris. Pada waktu itu Kapitalisme (kelas borjuis) mempunyai arti yang revolusioner dalam melawan feodalisme, menciptakan fase perubahan yang lebih maju satu tingkat dari sistem

²² D.N. Aidit, *Tentang Marxisme*. Akademik Ilmu Sosial Aliarcham, (Jakarta: 1963), hlm 32.

feodalisme. Namun dalam perkembangannya sekarang ini, kapitalisme tersebut kehilangan watak revolusionernya dan menjadi reaksioner, karena kelas borjuis tidak lagi menginginkan adanya perubahan revolusioner dalam masyarakat; melainkan bersikukuh mempertahankan sistem masyarakat yang ada (kapitalisme) dan mengulangi skema penindasan yang telah dilakukan oleh kaum feodal sebelumnya, yakni menjadi penindas baru bagi kelas pekerja dan rakyat miskin lainnya. Selanjutnya, dalam dialektika terdapat salinghubungan yang kompleksnya baik secara langsung maupun tidak langsung, kesemua itu belum tentu sama artinya, peranan dan kedudukannya. Masing-masing ada yang memainkan peranan yang menentukan, ada juga yang hanya mempengaruhi saja; ada yang bersifat keharusan dan ada juga yang kebetulan; ada yang merupakan sebab dan ada juga yang merupakan akibat; ada yang pokok dan ada juga yang bukan pokok; dan seterusnya berdasarkan hukum-hukum perkembangan obyektif pada setiap kondisi, ruang dan waktu tertentu.

Lebih lanjut, materialisme dialektika berpendapat bahwa dunia materiil ini berada dalam keadaan bergerak dan berkembang. Engels (1875) dalam karyanya “Dialektika Alam” menerangkan bahwa:

Seluruh alam, dari sesuatu yang sekecil-kecilnya sampai pada yang sebesar-besarnya, dari yang sebutir pasir sampai matahari, dari protista sampai manusia, adalah dalam keadaan yang senantiasa timbul dan lenyap, dalam keadaan yang senantiasa mengalir, dalam keadaan gerak dan berubah yang tiada henti-hentinya.

Kemudian dalam karyanya yang berjudul “Anti-Duhring”, Engels (1878) menerangkan lebih lanjut bahwa “*gerak merupakan eksistensi materi*”. Artinya, dimanapun tidak pernah ada dan tidak mungkin ada suatu materi tanpa gerak. Dalam hal ini, filsafat materialisme dialektis menggariskan dua komponen dalam gerak materi, yaitu bahwa gerak materi merupakan “gerak sendiri” dan “diam” juga merupakan bentuk gerak.

Pertama, bahwa materi bukan disebabkan karena dorongan dari kekuatan diluar materi melainkan karena kekuatan internal yang ada didalam materi itu sendiri. artinya faktor-faktor luar hanya dapat mempengaruhi gerak materi tetapi bukan yang menentukan gerak materi. Dengan kata lain, bahwa faktor-luar adalah syarat dan faktor-dalam adalah sebab daripada gerak dan perubahan materi tersebut. Misalnya, kemerdekaan Indonesia bukan disebabkan dari kekuatan diluar masyarakat Indonesia, melainkan ditentukan atas dasar kekuatan dalam negeri sesuai dengan kehendak dan kemauan bangsa Indonesia sendiri; *kedua*, bahwa diam atau statis juga merupakan suatu bentuk gejala daripada gerak materi, karena dalam keadaan tertentu mengalami keseimbangan antara kekuatan-kekuatan didalam materi maupun dari luar materi. Artinya keseimbangan kekuatan baik dari dalam maupun dari luar materi merupakan suatu keadaan yang sifatnya sementara dan relatif—yang disebut sebagai kestabilan relatif daripada suatu kualitas materi tersebut. Itulah sebabnya dialektika yang bergerak dan berkembang tersebut dikenal dengan istilah peribahasa “patah tumbuh hilang berganti” atau “zaman beralih musim berganti”.

Dalam rakitan materialisme dialektik menjadi sebuah kajian filosofis, dapat ditemukan rangkaian persepsi yang sama dari berbagai literatur kaum Marxist yaitu terdapat tiga dalil, atau azaz, atau dengan kata lain “tiga hukum perkembangan materialisme dialektik”. Ketiga hukum yang dimaksud adalah Hukum Kontradiksi, Hukum Perubahan Kuantitatif ke Kualitatif dan Hukum Negasi dari Negasi. Berikut penjelasan singkatnya:

1) Hukum Kontradiksi

Hukum kontradiksi adalah suatu pertentangan dan perbedaan materi (keadaan obyektif) antara satu dan yang lainnya. Artinya, hukum kontradiksi merupakan sebab dari gerak (perubahan dan perkembangan) suatu hal ikhwal pada fase tertentu. Tentu

saja kontradiksi yang terkandung dalam suatu materi tidak hanya satu melainkan lebih atau banyak—dimana semua itu tidak sama kedudukannya, peranannya, sifatnya dan wataknya. Darsono Prawironegoro (2012) dalam karyanya yang berjudul “Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi”, memaparkan ada tiga macam kontradiksi yaitu:

- a) Kontradiksi Pokok dan Tidak Pokok. Kontradiksi pokok adalah kontradiksi yang menjadi poros yang dapat memimpin dan menentukan adanya kontradiksi yang lain yang bukan pokok. Kontradiksi pokok itu dalam penyelesaiannya harus diutamakan. Adapun kontradiksi tidak pokok adalah kontradiksi yang adanya ditentukan oleh kontradiksi pokok, perkembangannya dipimpin dan tunduk kepada kontradiksi pokok. Misalnya, dalam sistem sosial feodalisme, kontradiksi pokoknya adalah kaum tani hamba dengan kaum feodal, yang kemudian berkembang menjadi kontradiksi antara kaum borjuis dengan kaum feodal, pada akhirnya melahirkan Revolusi Borjuis di Perancis tahun 1789.
- b) Kontradiksi Dasar dan Tidak Dasar. Kontradiksi dasar ialah kontradiksi yang kepentingannya bertentangan antara yang satu dengan yang lain dan tidak bisa dikompromikan, atau kontradiksi yang menentukan adanya bentuk sesuatu (perubahan dan perkembangan). Misalnya, dalam sistem sosial kapitalis, kontradiksi dasar adalah kontradiksi antara kaum kapitalis dengan kaum buruh. Kaum kapitalis mempunyai kepentingan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya melalui sistem kerja upahan, dimana upah dibayar serendah-rendahnya. Sedangkan kaum buruh mempunyai kepentingan hidup layak sebagai manusia. Contoh lainnya, sistem sosial dewasa ini, kontradiksi dasarnya adalah negara-negara terjajah dengan kaum imperialis (kaum penjajah). Kaum imperialis mempunyai kepentingan memperoleh keuntungan melalui penjajahan, sedangkan bangsa-bangsa terjajah ingin hidup layak dan bebas dari penjajahan.

c) Kontradiksi Antagonis. Kontradiksi ini mempunyai pengertian, yaitu antagonis dalam artian wataknya dan dalam artian bentuknya. Dalam artian wataknya atau kontradiksi berwatak antagonis adalah kontradiksi yang kepentingannya sama sekali bertentangan satu dengan yang lain dan tidak bisa dikompromikan. Contohnya adalah kontradiksi antara kaum imperialis dengan bangsa-bangsa terjajah, atau kontradiksi antara kaum kapitalis dengan kaum buruh. Penyelesaiannya dengan kekerasan dan saling menghancurkan. Sedangkan dalam artian bentuknya atau kontradiksi yang berbentuk antagonis, adalah kontradiksi yang penyelesaiannya mengambil bentuk kekerasan, walaupun watak kontradiksinya sendiri tidak antagonis.²³

Ketiga macam kontradiksi diatas mempunyai salinghubungan, tetapi satu kontradiksi belum tentu mengandung ketiga macam kontradiksi sekaligus. Artinya, kontradiksi pokok belum tentu menjadi kontradiksi dasar atau berwatak antagonis; sementara kontradiksi dasar salah satunya tentu menduduki dan menjadi kontradiksi pokok, tetapi belum tentu menjadi kontradiksi antagonis; sedangkan kontradiksi yang berwatak antagonis, tentu akan menjadi kontradiksi dasar karena mempunyai kepentingan yang berbeda dan tentu menduduki serta menjadi kontradiksi pokok. Pada hakikatnya, hukum kontradiksi merupakan hukum persatuan dan perjuangan dari segi-sigi yang berkontradiksi menuju suatu tingkat perkembangan dan perubahan tertentu. Disebut hukum persatuan dan perjuangan karena dalam kehidupan sosial,

²³ Darsono Prawironegoro, *Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*. (Nusantara Consulting, Jakarta: 2012), hlm 48-50.

setiap masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama dapat menjalin persatuan dan melakukan tindakan perjuangan bersama, untuk mengakhiri suatu kontradiksi yang tidak bisa dikompromikan lagi.

2) *Hukum Kuantitatif ke Kualitatif*

Kuantitas dalam arti luas adalah jumlah yang meliputi bilangan, susunan, saling hubungan dan komposisi. Dalam hukum ini, menerangkan jalannya suatu proses perkembangan segala sesuatu dari tingkatan kuantitas menjadi suatu kualitas. Artinya kuantitas mempunyai peranan yang menentukan kualitas. D.N. Aidit (1963) menerangkan bahwa:

Perubahan kuantitatif berlangsung secara berangsur-angsur, secara evolusioner; tetapi sampai pada batas tertentu, apabila bingkai lama diterjang, ia menimbulkan perubahan kualitatif yang berlangsung secara tiba-tiba, secara revolusioner dan merupakan suatu loncatan. Perubahan kuantitatif menyiapkan perubahan kualitatif, dan perubahan kualitatif menyelesaikan perubahan kuantitatif yang lama dan melahirkan serta mengembangkan perubahan kuantitatif yang baru.

Kemudian A.M. Ramly (2013), menerangkan bahwa:

Perubahan berlangsung melalui mutasi-mutasi kuantitatif yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera sehingga mencapai titik yang disebut *node*. Selanjutnya, ilustrasi klasik tentang perubahan dari kuantitas menghasilkan perubahan kualitas dapat dilihat apabila air mendidih 100 derajat celcius ke arah titik beku 0 derajat celcius. Tepat pada saat perubahan terjadi dari taraf panas secara tiba-tiba air itu membeku atau air yang sama dari titik beku kemudian dipanaskan, maka pada saat tertentu pula air itu akan mendidih dan menguap. Proses ini disebut taraf-taraf agregasi dari alam.

Akan tetapi proses perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif juga mensyaratkan kondisi tertentu pula. Menurut Darsono Prawironegoro (2012), menerangkan bahwa:

Perubahan kuantitas itu akan mencapai kualitas hanya sesudah mencapai titik batas tertentu, yaitu titik batas tertinggi atau terendah, titik batas maksimum atau minimum dari syarat bagi berubahnya suatu kualitas. Artinya, perubahan kuantitas semata-mata yang tidak mencapai titik batas, tidak akan mengubah kualitas lama, dan kurang ada artinya bagi suatu perkembangan. Misalnya dalam masyarakat feodal, perubahan kekuasaan dari raja yang satu ke raja yang lainnya merupakan perubahan yang kuantitatif, yang tidak akan mengubah kualitas masyarakat feodal tersebut. Dalam masyarakat kapitalis, pengertian presiden, atau perdana menteri adalah perubahan kuantitatif yang tidak akan mengubah kualitas masyarakat kapitalis.

Dalam hal ini, sama seperti pandangan kebanyakan kaum marxist, yang meyakini perubahan kualitas adalah perubahan yang menghancurkan kualitas lama. Terjadinya proses loncatan perubahan dari kualitas lama ke kualitas baru karena melalui proses perubahan kuantitas. Artinya, tanpa adanya perubahan kuantitas terlebih dahulu maka dapat dipastikan bahwa perubahan kualitas tidak akan pernah terjadi. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, perubahan dari masyarakat pemilik budak menjadi masyarakat feodal, masyarakat feodal ke masyarakat kapitalis dan dari masyarakat kapitalis ke masyarakat sosialis adalah perubahan kualitatif secara revolusioner—melalui proses perubahan kuantitatif secara evolusioner. Proses perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif mempunyai hubungan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Dari hukum ini dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan berkembang tidak secara gradual, tetapi melalui lompatan-lompatan materi—yang senantiasa bergerak (berubah dan

berkembang). Melalui hukum ini juga kita dapat mengamati perubahan sistem ekonomi-politik dari setiap perkembangan masyarakat fase demi fase, dan melalui hukum ini pula kita dapat menganalisis perkembangan kapitalisme yang dalam perspektif sejarah akan sampai pada tataran sosialisme.

3) *Hukum Negasi dari Negasi*

Negasi adalah penyangkalan atau peniadaan, dengan kata lain pengingkaran. Hukum negasi dari negasi adalah hukum arah gerak (perubahan dan perkembangan) dari suatu materi—yang arahnya tentu akan menuju ke bentuknya semula atau pada bentuk awalnya, dengan isi atau kualitasnya yang baru. Hukum ini menerangkan bahwa gerak materi tentu akan meniadakan yang meniadakan atau menegasi yang menegasi. Materialisme dialektis, melalui hukum ini menjelaskan bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat, mula-mulanya adalah masyarakat tanpa kelas dan sebelum ia kembali pada bentuk semulanya, maka masyarakat itu masih dalam proses bergerak yakni perubahan dan perkembangannya masih dalam proses perjalanan. Oleh sebabnya, hukum negasi dari negasi ini menyatakan wataknya yang progresif dari suatu perkembangan, yang terus bergerak mengikuti garis maju sampai mencapai bentuk awalnya yang lebih berkualitas. Darsono Prawironegoro (2012) menerangkan bahwa:

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, masyarakat tanpa kelas di negasi oleh masyarakat pemilik budak. Masyarakat pemilik budak di negasi oleh masyarakat feodal. Masyarakat feodal di negasi oleh masyarakat kapitalis, dan masyarakat kapitalis di negasi oleh masyarakat tanpa kelas yang lebih maju (Sosialisme).

Berangkat dari paparan Darsono di atas, maka dapat kita temukan titik awal proses perkembangan suatu gerak materi dalam masyarakat. Dimana masyarakat tanpa kelas yang awal yaitu di masa kumunal primitif (masa lalu), berkembang dan

terus mengalami negasi dari negasi, hingga pada akhirnya kembali pada bentuknya seperti semula yaitu masyarakat tanpa kelas yang disebut “Sosialisme” (masa depan), yang dimana sosialisme adalah suatu tingkat perkembangan masyarakat yang lebih maju dari pada sistem masyarakat sebelumnya. Artinya, walaupun pada fase kumunal primitif dan fase sosialisme mempunyai kesamaan bentuk masyarakat tanpa kelas, namun secara kualitas berbeda—karena masyarakat tanpa kelas dimasa sosialisme adalah masyarakat modern, berpengetahuan tinggi, telah majunya teknologi, dan lain sebagainya—secara kesadaran melampaui kondisi sebelumnya melalui kontradiksi-kontradiksi yang saling menegasikan. Itulah hukum arah gerak (perubahan dan perkembangan) secara spiral dari gerak materi.

Dengan menggunakan filsafat materialisme dialektik ini, maka kita dapat berpikir dialektik yaitu berpikir tentang saling hubungan, kontradiksi dan gerak (perubahan dan perkembangan) suatu materi—dimana dalam hukum materialisme, materi adalah kenyataan obyektif (alam dan sosial). Hukum dialektika ini mengajarkan bahwa dalam memandang dan mengubah atau menyelesaikan suatu masalah, tentu harus mengenali terlebih dahulu secara tepat tingkat-tingkat perkembangan yang dialaminya, dan juga harus mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan sebuah perubahan serta syarat-syarat yang terkandung didalamnya.

b) Materialisme Historis (*historical materialism*).

Dalam tradisi marxisme, materialisme historis adalah penerapan dari materialisme dialektik dari sudut pandang sejarah didalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan suatu ciri yang terpenting dari Marx yang membedakannya dengan kaum materialisme sebelumnya, karena tidak dapat memandang materialisme dalam masalah-masalah sosial dan sejarah. Doug Lorimer (2013), menerangkan bahwa:

Sumbangan terbesar Marx dan Engels bagi perkembangan pemikiran ilmiah adalah karena mereka telah menyempurnakan materialisme yang baru setengah-jadi, yakni, mereka mengembangkannya pada studi tentang masyarakat, sehingga cara pandang materialis dalam melihat dunia, untuk pertama kalinya, menjadi komprehensif dan sepenuhnya konsisten serta efektif, ampuh.²⁴

Begitu juga dengan D.N. Aidit (1963), menerangkan bahwa:

Dengan materialisme historis, Marx menunjukkan hukum-hukum obyektif perkembangan masyarakat, menjelaskan secara ilmiah sebab-sebabnya kelahiran, perkembangan dan kehancurannya suatu sistem masyarakat. Ia menyatakan bahwa pencipta sejarah adalah massa rakyat pekerja, bukan individu-individu istimewa, misalnya raja, pahlawan, dsb.²⁵

Dari paparan diatas, bahwa filsafat materialisme historis sejatinya mengungkapkan gejala-gejala alam dan sosial masyarakat dengan pendekatan sejarah. Artinya, sejarah itu diciptakan oleh manusia melalui kerja produksi untuk keberlangsungan hidupnya, dan terciptalah suatu relasi atau hubungan-hubungan sosial dalam berkerja, yang kemudian terus berkembang hingga terciptanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Bagi Marx, hubungan sosial yang terbagi dalam kelas-kelas ini mencerminkan suatu corak produksi tertentu dimana ada kelas yang memiliki alat produksi dan kelas yang tidak memiliki alat produksi. Keduanya saling bertentangan karena kepentingan yang berbeda-beda antara setiap kelas dalam masyarakat, dan

²⁴ Doug Lorimer, *Pokok-pokok Materialisme Historis*. (Bintang Nusantara: 2013), hlm 33-34.

²⁵ *Ibid*, hlm 49.

pertentangan antar kelas merupakan suatu keniscayaan. Ini jelas seperti yang ditulis Karl Marx dan Engels (1848), mengatakan bahwa “*sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas*”²⁶. Dalam corak produksi tertentu, pertentangan-pertentangan yang terjadi dan kemudian melahirkan kelas dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi dalam hubungan produksi kebutuhan hidup. Miriam Budiardjo (2015), menerangkan bahwa:

Menurut Marx perkembangan dialektis terjadi lebih dahulu dalam struktur bawah (atau basis) dari masyarakat, yang kemudian menggerakkan “struktur atasnya”. Basis dalam masyarakat bersifat ekonomis dan terdiri atas dua aspek, yaitu cara berproduksi (Misalnya teknik dan alat-alat) dan hubungan ekonomi (misalnya sistem hak-milik, pertukaran dan distribusi barang). Diatas basis ekonomi berkembanglah struktur atas yang terdiri dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, konsep-konsep hukum, kesenian, agama, dan yang dinamakan ideologi. Perubahan sosial politik dalam masyarakat disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi yakni pertentangan atau kontradiksi dalam kepentingan-kepentingan terhadap tenaga-tenaga produktif, sedangkan lokomotif dari perkembangan masyarakat adalah pertentangan antara kelas sosial.²⁷

Singkatnya, Marx dan Engels dalam karyanya yang berjudul “Ideologi Jerman: Jilid I Feuerbach”, juga menerangkan konsepsi sejarah materialisme bahwa:

Ada dua segi dalam hal ini: *pertama*, produksi (hubungan aktif masyarakat dengan alam, pengaruh mereka terhadapnya); dan *kedua*, hubungan sosial (hubungan antar manusia dalam aktifitas mereka). Produksi dan hubungan sosial saling

²⁶ Karl Marx dan Friedrich Engels, *Manifesto Partai Komunis*. (Cakrawangsa Yogyakarta: 2014), hlm 35.

²⁷ *Ibid*, hlm 143.

mempengaruhi, namun segi yang menentukan dari hubungan timbal balik ini adalah produksi. Istilah “hubungan produksi” (*relations of production*) untuk pengertian hubungan manusia dalam produksi, sebagai hubungan dasar (*basic relation*) dari hal ikhwal.²⁸

Oleh sebabnya, konsepsi materialisme historis dimulai dari proposisi bahwa produksi kebutuhan-kebutuhan untuk menjamin kehidupan manusia, kemudian pertukaran barang-barang yang diproduksi, merupakan dasar dari semua struktur masyarakat; bahwa dalam setiap masyarakat yang telah muncul dalam sejarah, cara kekayaan didistribusikan dan cara masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas sosial bergantung pada apa yang diproduksi, bagaimana itu diproduksi, dan bagaimana hasil produksi itu dipertukarkan. Dari sudut pandang ini, kaum marxian meyakini bahwa sebab-sebab akhir dari semua perubahan sosial dan revolusi mesti diciptakan, namun tidak dalam benak-benak manusia, tidak dalam wawasan manusia yang lebih baik akan kebenaran dan keadilan, tetapi didalam perubahan-perubahan dalam corak produksi dan pertukaran—didalam perekonomian pada tingkat tertentu.

Dengan memproduksi alat-alat untuk menunjang kehidupannya (*subsistence*), manusia secara tidak langsung memproduksi kebutuhan materialnya. Oleh karenanya, cara produksi (*mode of production*) tidak bisa hanya dianggap sebagai reproduksi fisik individual, lebih tepatnya ia adalah cara tertentu dari aktivitas individu-individu, yang merupakan cara tertentu dari ekspresi kehidupan mereka yakni cara hidup (*mode of life*) mereka sendiri. Marx dan Engels, secara ilmiah mampu menganalisis proses tersebut

²⁸ Karl Marx dan F. Engels, *Ideologi Jerman*. (Pustaka Nusantara: 2013), hlm xxi.

dalam hal, seperti apakah individu-individu manusia itu terjalin dalam mengekspresikan hidup. Jadi, apakah hakekat hidup mereka berkaitan dengan produksi? apa yang di produksi dan bagaimana mereka memproduksi? Karena itu, individu-individu tersebut tergantung pula pada kondisi material dari produksi mereka. Dalam perkembangannya, cara produksi berubah wujud secara terus-menerus berdasarkan peningkatan populasi dan penemuan teknik-teknik baru. Kemudian terdapat hubungan antara individu, dan bentuk hubungan ini pun ditentukan (*determined*) oleh produksi itu sendiri.

Dari berbagai persepsi kaum marxist, setidaknya terdapat beberapa komponen penting dalam memahami materialisme historis, berikut penjelasan singkatnya:

1) Kerja Produksi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup materiil, manusia harus memproduksi barang-barang. Barang-barang yang diproduksi merupakan sarana kerja, dan untuk memproduksi sarana kerja itu dibutuhkan alat kerja, metode kerja dan tenaga kerja. Misalnya, dalam masyarakat kapitalis, alat produksi dimiliki oleh kaum kapitalis. sedangkan buruh berkerja berdasarkan sistem kerja upahan, dimana hasilnya sepenuhnya menjadi milik kaum kapitalis. Dalam proses produksi manusia tentu saja memerlukan dan mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang oleh Marx disebut sebagai hubungan produksi. Darsono Prawironegoro (2012), menerangkan hubungan produksi bahwa:

Hubungan produksi itu ditentukan oleh pemilik alat produksi, kemudian keseluruhan hubungan produksi menentukan suatu sistem ekonomi masyarakat.

Sistem ekonomi pada hakikatnya merupakan sistem masyarakat dan sebagai basis kehidupan masyarakat dan di atasnya terdiri bangunan atas.²⁹

Berangkat dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja produksi memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan material masyarakat, kemudian menentukan hubungan produksi dan sistem ekonomi, yang pada gilirannya melahirkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat berdasarkan kepemilikan alat-alat produksi.

2) *Keadaan Sosial Menentukan Kesadaran Sosial*

Marx dengan tegas mengatakan bahwa kesadaran sosial dilahirkan dari keadaan sosial. kesadaran sosial yaitu ide, gagasa dan pikiran yang ada pada manusia. Bagi Marx, Kesadaran merupakan cerminan atau refleksi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya memproduksi barang-barang material, atau dengan kata lain dalam keadaan sosialnya serta dalam kehidupan riilnya. Marx dan Engels dalam karya “Ideologi Jerman”, juga menerangkan bahwa:

Kesadaran tidak menentukan kehidupan, namun kehidupan yang menentukan kesadaran. Pola pendekatan pertama (idealis) bertolak dari kesadaran tentang kehidupan individu. Pola pendekatan kedua (materialis) yang selalu bertumpu pada kehidupan nyata, berfokus pada kehidupan individu-individu nyata itu sendiri, dan kesadaran hanya dipahami sebagai kesadaran mereka.³⁰

Selanjutnya, Doug Lorimer (2013), juga mengatakan hal serupa bahwa:

²⁹ *Ibid*, hlm 62.

³⁰ *Ibid*, hlm 19.

Keberadaan sosial adalah primer karena berada diluar dan *independen* dari kesadaran sosial: kesadaran sosial adalah sekunder karena merupakan refleksi dari keberadaan sosial manusia, dari hubungan sosialnya.³¹

Tentu saja kesadaran sosial yang dimaksudkan merupakan manifestasi dari keadaan sosial, yang merupakan suatu proses dari cara dan hubungan produksi— yang kemudian “menentukan” kesadaran masyarakat. Kecepatan berubah dan berkembangnya cara produksi itu ditentukan oleh berubah dan berkembangnya kemampuan tenaga kerja manusia, dan berubah dan berkembangnya tenaga manusia itu ditentukan oleh berubah dan berkembangnya alat produksi.

Dalam proses produksi lahir dua kesadaran sosial yaitu kesadaran sosial pemilik alat produksi (klas pemodal) dan kesadaran sosial bukan pemilik alat produksi (klas pekerja). Lebih lanjut, Darsono Prawironegoro (2012), menerangkan sebagai berikut:

Kesadaran sosial majikan adalah mempertahankan dan mengembangkan alat produksi. Karena dengan pemilikan alat produksi itu majikan memperoleh laba atau nilai lebih dari buruh yang digunakan untuk mengoperasikan alat kerja tersebut. Sedangkan kesadaran sosial buruh adalah anti kepada majikan karena merasa hasil kerjanya dirampas oleh majikan melalui sistem kerja upahan, dimana besarnya upah ditentukan secara sepihak oleh majikan (pemilik alat produksi perseorangan atau kelompok kecil masyarakat). Hakikat kesadaran sosial ditentukan oleh hubungan produksi atau ditentukan oleh status sosial, dan hanya dua kesadaran sosial yaitu: (1) kesadaran sosial untuk mempertahankan kepemilikan alat produksi

³¹ *Ibid*, hlm 64.

perseorangan atau kelompok kecil masyarakat, ini disebut kesadaran sosial masyarakat kapitalisme, dan (2) kesadaran sosial untuk kepemilikan bersama alat produksi secara kolektif sebagai milik seluruh masyarakat, ini disebut kesadaran sosial masyarakat sosialis-komunisme.³²

Analisis Marx yang terkandung dari paparan diatas adalah kehidupan sosial ekonomi (*man social being*) ditempatkan sebagai perangkat yang mendasari setiap kiprah kasadaran manusia (*man social consciousness*). Artinya, faktor materi selalu menjadi penentu sedangkan faktor kesadaran harus ditentukan oleh suatu kondisi yang tercipta.

3) *Basis dan Bangunan Atas*

Dari berbagai literatur kaum marxist, meyakini bahwa istilah basis dan bangunan atas ini merupakan suatu bentuk formasi sosio-ekonomi (*sosio-economic formation*). Basis kehidupan sosial dan perkembangan sejarah adalah jalan dimana manusia mengorganisir produksi barang-barang yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang telah diakui secara sosial dan hubungan produksi sosial. Artinya, setiap masyarakat adalah manifestasi tipe formasi sosio-ekonomi tertentu, sebuah sistem sosial terintegrasi yang berfungsi dan berkembang menurut hukum-hukum khususnya sendiri pada basis hubungan produksi. Inilah yang dinamakan sebagai basis dan bangunan atas dengan kata lain basis disebut “infrastruktur” dan bangunan atas disebut “suprastruktur”. Darsono Prawironegoro

³² *Ibid*, hlm 69.

(2012) dalam bukunya yang berjudul “Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi”, menerangkan bahwa:

Basis adalah suatu sistem ekonomi. Faktor-faktor dari sistem ekonomi yaitu pemilikan alat produksi, distribusi hasil produksi, dan pertukaran hasil produksi. Dari ketiga faktor tersebut yang paling menentukan ialah faktor pemilikan alat produksi. Adapun bangunan atas adalah suatu cerminan dari basis. Bangunan atas ialah sesuatu yang berdiri di atas, karena kekuatan basis. Bangunan atas terdiri dari dua faktor, yaitu faktor ide dan faktor pelaksana ide (realisasi ide). Dari dua faktor itu yang paling penting dan menentukan adalah faktor alat pelaksana ide atau alat realisasi ide, atau negara, karena negara mempunyai birokrasi, tentara, dan penjara.³³

Selanjutnya, Doug Lorimer (2013) dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Materialisme Historis: Pandangan Marxis terhadap Sejarah dan Politik”, juga mengutarakan hal serupa bahwa:

Basis dan suprastruktur adalah elemen struktural pokok dari formasi sosio-ekonomi manapun. Basis dan suprastruktur adalah konsep relatif, mendefinisikan dua tingkat yang berbeda dalam perkembangan sosial. Basis adalah struktur ekonomi masyarakat, jumlah total hubungan sosial dalam masyarakat tertentu. Konsep basis menunjukkan fungsi sosial dari hubungan produksi sebagai basis ekonomi fenomena sosial yang berada diluar bidang produksi material. Sementara hal tersebut merupakan bentuk tenaga produktif, hubungan produktif pada saat yang sama

³³ *Ibid*, hlm 76.

menentukan isi bentuk suprastruktur. Suprastruktur adalah jumlah total hubungan sosial “ideologis” yang muncul pada basis ekonomi tertentu, yaitu, jumlah total hubungan sosial yang secara sadar diciptakan manusia.³⁴

Berangkat dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa basis dan bangunan atas adalah dua hal ikhwal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan materil masyarakat, yaitu keduanya mempunyai hubungan yang erat dimana basis menentukan bangunan atas. Artinya pola relasi dan hubungan sosial masyarakat ditentukan berdasarkan basis ekonomi, yaitu hubungan produksi antara yang memiliki alat produksi dan yang tidak memiliki alat produksi, sehingga dalam perkembangan tertentu menciptakan kelas-kelas sosial (formasi sosial) dalam masyarakat. Maka dalam hal ini, kelas sosial yang dominan secara ekonomi kemudian menguasai atau mengendalikan suprastruktur (negara). Ini dapat dilihat dalam masyarakat kapitalis, dimana kaum modal atau oligarki mendominasi ekonomi-politik suatu negara, termasuk di Indonesia.

4) Klas dan Perjuangan Klas

Pada umumnya kaum marxist mengakui bahwa klas dan perjuangan klas ialah inti dari ajaran marxisme. Sebab menurut Karl Marx, sejarah perubahan dan perkembangan masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Marx membagi klas dalam masyarakat menjadi dua klas yang berdasarkan kepemilikan alat-alat produksi. Kedua kelas tersebut yaitu klas pemilik alat produksi dan klas bukan pemilik alat produksi. Bagi Marxisme, kedudukan kelas sosial dalam masyarakat

³⁴ *Ibid*, hlm 190.

ditentukan berdasarkan hubungannya dengan pemilikan alat-alat produksi. Marx dan Engels dalam bukunya yang tersohor dikalangan kaum marxis yaitu berjudul “Manifesto Partai Komunis”, menerangkan bahawa:

Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas.³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, Marx dan Engels menggambarkan bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat telah menciptakan kelas-kelas sosial atau golongan yang senantiasa saling bertentangan satu dengan yang lainnya, berdasarkan hubungan produksi antara pemilik alat produksi (kaum borjuis) dan bukan pemilik alat produksi (kaum proletar). Lebih lanjut, Marx dan Engels juga menyatakan sebagai berikut:

... Pendeknya: penindas dan yang tertindas, senantiasa ada dalam pertentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang tiada putus-putusnya, kadang-kadang dengan tersembunyi, kadang-kadang dengan terang-terangan, suatu perjuangan yang setiap kali berakhir dengan penyusunan kembali masyarakat umumnya atau dengan sama-sama binasanya kelas-kelas yang bermusuhan.³⁶

Dari uraian diatas, Marx dan Engels membenarkan bahwa pertentangan kelas-kelas dalam masyarakat adalah sebuah kondisi materiil obyektif yang tidak terelakan, karena pertentangan tersebut secara obyektif ditentukan oleh relasi produksi dalam

³⁵ K. Marx dan F. Engels, *Manifesto Partai Komunis*. Cetakan pertama versi Indonesia, (Cakrawangsa Yogyakarta: 2014), hlm 35.

³⁶ *Ibid*, hlm 35.

masyarakat yang kemudian membentuk kelas sosial (kelas penindas dan tertindas), dan mereka saling bertentangan karena perbedaan kesadaran dan kepentingannya. Marx melihat perkembangan masyarakat dengan pendekatan sejarah, dimana dari awal permulaan sejarah, pasca kumunal primitif masyarakat telah terbagi dalam kelas-kelas sosial. Pada zaman perbudakan terdapat golongan pemilik budak dan kaum budak, pada zaman feodal terdapat golongan raja atau tuan tanah dan kaum tani hamba, dan pada zaman kapitalisme masyarakat juga masih terbagi antara kaum borjuis dan kaum proletar (kelas pekerja: buruh-tani). Inilah yang dikatakan Marx diatas bahwa dalam tingkatan sejarah yang ada saat ini, perjuangannya selalu berakhir dengan masih melahirkan atau menyusun kembali masyarakat berkelas—dimana masih terdapat relasi eksploitasi atau penindasan pada suatu kelas tertentu. Pada akhirnya Marx, menggambarkan perjuangan kelas yang dipelopori oleh kaum proletariat akan menjungkir-balikkan sistem masyarakat yang menindas tersebut dan menggantikannya dengan sitem tanpa penindasan yang disebut “sosialisme”.

Dalam perkembangan muktahir saat ini, yakni zaman kapitalisme yang merupakan masyarakat borjuis modern, yang timbul dari runtuhannya masyarakat feodal juga tidak menghilangkan pertentangan-pertentangan kelas. Ia hanya menciptakan kelas baru, bentuk-bentuk perjuangan baru sebagai ganti yang lampau. Artinya zaman kapitalisme akan menciptakan pertentangan atau kontradiksi alami karena hubungan produksinya antara kaum borjuis dan kaum proletar. Bagi Marx, pertentangan tersebut adalah keniscayaan sejarah yang tidak terelakan. Inilah yang bagi Marx sebagai perjuangan kelas. Di dalam kapitalisme saat ini, kaum proletar akan berjuang melawan penindasan kaum borjuis, serta kaum proletar akan mengakhiri pertentangan kelas untuk selamanya dalam masyarakat. Sebab kaum proletar telah menemukan akar dari penindasan yaitu kepemilikan alat

produksi secara pribadi, dan sebagai gantinya, alat produksi harus dimiliki secara sosial dan dikelola secara kolektif untuk kepentingan bersama. Inilah yang mendasari perjuangan kelas kaum proletar yang hendak menghapuskan sistem hak-milik pribadi (kapitalisme) dan menggantikannya dengan suatu sistem kepemilikan bersama, “Sosisalisme”—yang cita-cita utamanya ialah menghapus kelas-kelas dalam masyarakat. Oleh karenanya, perjuangan kelas melalui “revolusi proletariat” adalah suatu ajaran yang mengilhami kaum marxist secara ideologis – sebagai proses perjuangan yang tertinggi dan terakhir dalam perkembangan sejarah masyarakat.

5) *Peranan Massa dan Pimpinan dalam Sejarah*

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, telah membuktikan bahawa individu-individu manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok, atau golongan (klas sosial) dalam masyarakat, sehingga dalam perkembangannya pun terdapat pembagian peran, yaitu ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang menjadi pengikut (massa). Pemimpin dan massa ibaratkan dua sisi dari satu keping mata uang, yaitu pemimpin dan massa merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Pertama. Peranan Massa (Rakyat Pekerja). Secara umum, massa yang dimaksud adalah segerombolan besar manusia dalam masyarakat yang mempunyai ikatan dan kepentingan tertentu. Dalam masyarakat yang terbagi menjadi kelompok atau golongan berdasarkan ikatan dan kepentingan tertentu, setidaknya dapat dipetakan seperti, golongan penguasa politik atau birokrat, golongan pengusaha (kaum modal-kapitalis), tuan tanah (feodal), militer, intelektual (ilmuan atau cendikiawan), rohaniawan, buruh (pekerja), petani (tani kaya, sedang dan miskin), buruh-tani, pelajar-mahasiswa, dan lain-lainnya. Namun, massa yang

menjadi fokus perhatian peneliti adalah rakyat pekerja. Sebab materialisme historis Marx berpandangan bahwa pencipta sejarah yang sesungguhnya adalah massa rakyat pekerja. Seperti yang diungkapkan oleh D.N Aidit (1963) bahwa:

Tanpa aktivitas manusia memproduksi kebutuhan-kebutuhan materiil masyarakat, masyarakat tak akan dapat berlangsung hidupnya, tak akan ada sejarahnya. Sedangkan yang melakukan produksi kebutuhan-kebutuhan materiil itu adalah massa rakyat pekerja. Oleh karenanya, perkembangan sejarah masyarakat adalah perkembangan sejarah produksi, adalah perkembangan sejarah massa rakyat pekerja.³⁷

Hal serupa juga dikemukakan oleh kebanyakan kaum marxist, seperti halnya Marx, mereka meyakini bahwa posisi dan peran massa rakyat pekerja merupakan lokomotif perubahan dalam sejarah perkembangan masyarakat, karena melakukan aktivitas produksi kebutuhan materiil demi keberlangsungan hidup umat manusia. Ini sejalan dengan pemikiran Marx (dalam Magnis Suseno: 2000), bahwa menurutnya “*pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar: dalam pekerjaan, manusia membuat dirinya menjadi nyata*”³⁸. Dengan kata lain, pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri sendiri, atau pekerjaan sebagai obyektivasi manusia. Artinya, dalam bekerja manusia mengubah alam sesuai dengan kepentingannya yang dilakukan secara sadar untuk melangsungkan hidup. Sebab, pekerjaan menjadi jembatan antara manusia dan

³⁷ *Ibid*, hlm 51.

³⁸ Frans M. Suseno, *Pemikiran Karl Marx*. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-IV. Jakarta: 2000, hlm 89.

dengan demikian pula manusia disebut sebagai makhluk sosial. Maka individu-individu manusia inilah yang dalam prosesnya membentuk masyarakat, sehingga mereka yang melakukan tindakan berkerja kemudian disebut “massa rakyat pekerja” dalam tradisi marxisme manapun dibelahan dunia. Dengan demikian kaum marxist menyakini bahawa pelaku sejarah dalam perkembangan masyarakat adalah massa rakyat pekerja – sebagai kekuatan inti yang menentukan perubahan sosial. Untuk melakukan perubahan sosial, massa (rakyat pekerja) dalam dinamika kehidupan dan perjuangannya tentu membutuhkan pimpinan, yang akan memberi bimbingan, petunjuk dan mengarahkan dalam menjalankan aktivitasnya. Namun pimpinan itu mesti lahir dari massa (rakyat pekerja) itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Pimpinan pun harus ditentukan oleh massa itu sendiri, bukan representasi dari pihak luar. Sehingga dengan demikian, sejatinya massa rakyat pekerja dapat melahirkan dan menentukan pimpinan yang senantiasa membela kepentingannya.

Kedua, Peranan Pimpinan. Pimpinan yang dimaksudkan disini bukan lain ialah massa itu sendiri, yang lahir, dibesarkan dan diangkat dari dan oleh massa. Maka pimpinan tersebut harus berperan menjadi sentral atau poros hidup dan kehidupan massa, yang senantiasa menjadi pedoman dalam menempuh hidup dan kehidupan massa. Dengan demikian, keberadaan pimpinan tidak bisa terpisah dari keberadaan massa, ia senantiasa berada ditengah-tengah massa, juga sikap dan tindakannya mesti sejalan (*representative*) dengan kehendak dan kepentingan massa. Oleh karenanya, pemimpin adalah individu dari massa yang menonjol, dimana ia mempunyai kelebihan tertentu dari massa yang lainnya. Kelebihan tertentu yang dimiliki seorang pemimpin setidaknya mampu terintegrasikan kedalam kepentingan bersama untuk menempuh jalan hidup dan kehidupan bersama pula. Darsono Prawironegoro (2012), menerangkan bahwa:

Beberapa kelebihan yang dimiliki pemimpin itu antara lain adalah bahwa seorang pemimpin adalah orang yang paling teguh pendiriannya, paling jernih pandangannya, paling tepat metode kerjanya, paling berpengaruh, paling berani berkorban dan berani menghadapi resiko, paling mengutamakan kepentingan bersama, paling pandai, paling rendah hati, paling mawas diri, paling tidak puas diri, paling bersikap tegas, tindakannya paling mewakili massa yang dipimpinnya, dan pikiran dan tindakannya paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan massa yang dipimpinnya.³⁹

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa pemimpin sejatinya merupakan manifestasi dari massa yang dapat mewakili segenap kepentingan, perasaan dan pikiran massa baik secara ideologi, politik, organisasi maupun ekonomi. Oleh karenanya, seorang pemimpin secara telaten dan konsekuen berkewajiban untuk memecahkan masalah atau mencari solusi yang dihadapi oleh massanya, menjalankan dan menjaga kepercayaan massa dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi. Sebab, pimpinan yang tidak mewakili kepentingan, perasaan dan pikiran massa dapat dipastikan akan kehilangan kepercayaan dari massanya dan akan diganti dengan pimpinan baru. Hukum ini berlaku dalam setiap organisasi apapun bentuknya, baik organisasi skala besar (negara), partai politik, organisasi massa, maupun dalam bentuk pranata sosial lainnya. Dalam tradisi marxisme, pikiran dan tindakan pimpinan harus berdasarkan *garis massa*, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kehendak dan kepentingan massa rakyat.

³⁹ *Ibid*, hlm 92.

Sekali lagi, massa dan pimpinan adalah satu kesatuan yang utuh. Dengan pengakuan bahwa massa rakyat pekerja adalah pencipta sejarah, bukan berarti kaum marxist menegasikan atau meremehkan peranan individu (pimpinan) dalam sejarah. Bagaimana pun, kaum marxist mengakui bahwa peranan pimpinan sangat penting dalam sejarah, tetapi juga mengakui bahwa peranan pimpinan bukanlah yang “menentukan”. Kaum marxist masih berteguh prinsip bahwa tetaplah massa rakyat pekerja yang memainkan peranan “menentukan” dalam sejarah. Sebab seorang pemimpin tiada apa-apanya tanpa massa (rakyat pekerja), dan ia juga merupakan bagian dari massa itu sendiri – tidak terpisahkan dari massa.

6) *Sejarah Perkembangan Masyarakat*

Dalam menganalisis sejarah perkembangan masyarakat, seperti yang sudah diterangkan pada uraian sebelumnya, dimana Karl Marx menegaskan bahwa berubah dan berkembangnya masyarakat ditentukan dari cara mereka memproduksi kebutuhan (barang) material. Cara produksi yang demikian ditentukan oleh tenaga produktif (*produktive force*), kemudian berubah dan berkembangnya tenaga produktif itu akan menentukan hubungan produksi (*production relationship*), pada tahap selanjutnya menentukan sistem ekonomi (dasar/basis) – yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan politik, sosial dan budaya dalam masyarakat atau sistem masyarakat (*community system*). Berdasarkan filsafat materialisme sejarah Marx, maka sejarah perkembangan masyarakat dapat dipetakan mulai dari masyarakat kumunal primitif, kemudian berubah dan berkembang menjadi masyarakat pemilikan budak, masyarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, masyarakat sosialisme dan yang terakhir masyarakat komunisme. Tingkat-tingkat sejarah perkembangan masyarakat akan peneliti diuarikan secara singkat sebagai berikut:

a) Masyarakat Kumunal Primitif

Masyarakat kumunal primitif merupakan tahap pertama dimana masyarakat menggunakan alat-alat berkerja yang sifatnya sangat sederhana. Alat-alat produksi yang digunakan pada masa itu bukan milik pribadi (perseorangan), melainkan milik bersama secara komunal (*communal*). Yang perlu dicatat pada tahap ini adalah masyarakat primitif belum mengenal surplus produksi diatas tingkat konsumsi, karena setiap orang maupun secara kelompok dalam klan masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dikarenakan kekayaan alam yang berkelimpahan. Marx dan Engels (1846) dalam buku “*The German Ideology*”, mengatakan bahwa tahap ini adalah pemilikan kesukuan (*tribal property*), yaitu sebagai berikut:

Tahap ini (pemilikan kesukuan) berkaitan dengan tahap produksi yang tak berkembang, yakni ketika masyarakat hidup dengan berburu dan memancing, perternakan atau pada umumnya pertanian. Dengan demikian, terdapat luas tanah yang tak tergarap. Pembagian kerja pada tahap ini masih sangat mendasar dan hanya meliputi perluasan lebih lanjut dari pembagian kerja alamiah dalam keluarga. Karena itu, struktur sosial hanya terbentuk dari perluasan keluarga: para kepala keluarga patriarkat dan dibawahnya adalah para anggota suku, serta akhirnya budak. Perbudakan laten dalam keluarga hanya berkembang bertahap sesuai dengan penambahan populasi, peningkatan

kebutuhan hidup dan perluasan hubungan eksternal, melalui perang dan barter⁴⁰.

Proses kehidupan (*dynamical of life*) dalam masyarakat komunal primitif juga diterangkan lebih lanjut oleh D.N Aidit (1963) dalam buku “Tentang Marxisme”, yaitu sebagai berikut:

... Untuk melindungi diri terhadap binatang-binatang buas dan untuk tidak mati kelaparan, mereka harus hidup bersama-sama, dalam kelompok-kelompok, yaitu komune-komune. Memburu, menangkap ikan, dan usaha-usaha lainnya untuk memelihara hidup mereka, semuanya dilakukan bersama, maka hasilnya juga mereka bagi bersama. Perkakas-perkakas produksi yang penting untuk kehidupan komune-komune itu bukan milik perseorangan, melainkan milik bersama, milik komune. Oleh sebab itu dalam masyarakat komune-primitif ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang mengisap orang lain, pendeknya masyarakat belum terbagi dalam klas-klas yang bermusuhan⁴¹.

Berangkat dari uraian diatas, masyarakat kumunal primitif atau pada zaman burbakala manusia hidup dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan berburu dan meramu, hidup berdampingan dalam satu klan/kerabat, alat produksi menjadi milik bersama dalam klan dan digunakan secara kolektif, hidup nomaden (berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain) apabila persediaan kebutuhan hidup ditempat tertentu sudah tidak mencukupi.

⁴⁰ Marx dan Engels, *Ideologi Jerman*. (edisi Indonesia: 2013), hlm 13.

⁴¹ *Ibid*, hlm 67-68.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi tersebut diatas menggambarkan bagaimana manusia saat itu hidup secara bersamaan dan kepemilikannya pun bersifat bersama (milik klan/komune), masyarakatnya masih tanpa klas, karena kondisinya tidak menyaratkan adanya kepemilikan pribadi/perseorangan. Sebab mereka hidup bergantung dengan alam dan berpindah-pindah, sehingga tidak ada kepentingan untuk melakukan penimbunan atau dalam bahasa masyarakat modern dewasa ini (kapitalisme) disebut akumulasi kapital. Disisi lain, alasan utama mereka hidup bersamaan dan kolektif, yaitu karena mereka tidak bisa hidup secara individual dalam melawan ganasnya kekuatan alam, sekalipun individu dilengkapi perkakas (alat produksi) tetapi mereka terlalu lemah dan tidak akan produktif. Oleh karenanya, tenaga produktif yang paling utama pada fase ini adalah “kekuatan kolektif”.

Seiring berjalannya waktu, proses demi proses dan tahap demi tahap, pengalaman manusia dalam memproduksi semakin berubah dan berkembang (dialektika), dan bersamaan dengan itu pula alat-alat produksi serta cara-cara berkerja semakin disempurnakan. Ini dapat dilihat ketika manusia telah menemukan logam, tembaga, perunggu dan besi—maka secara otomatis perkakas batu dan kayu yang primitif segera diganti dengan perkakas besi. Dengan demikian zaman pun beralih dan cara memproduksi pun semakin maju setingkat, yakni masyarakat yang tadinya hidup berburu kemudian hasil buruhannya dipelihara, yang awalnya hidup nomaden (pindah-pindah) menjadi hidup menetap, yang awalnya meramu menjadi bercocok tanam dan berternak, dan lain sebagainya. Bagi peneliti, kondisi perubahan ini terjadi secara alamiah berdasarkan perkembangan alat produksi dan hubungan

produksi, dengan kata lain, terjadinya perubahan *kognitif*⁴² dalam masyarakat kumunal primitif.

Selanjutnya, karena mereka telah menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri melalui menampung hasil kerjanya (menimbun), perlahan-lahan kebutuhan untuk berkerja secara kolektif pun hilang, dan persaingan antara manusia pun terjadi. Ketua-ketua komune atau kelompok yang bertindak sebagai wakil dalam pertukaran barang, kemudian menjadi hakim dan mulai menganggap milik bersama komune sebagai miliknya sendiri. ketua-ketua kelompok tersebut kemudian bertindak sebagai penguasa, dan begitu juga ada anggota-anggota komune yang dengan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, mulai mendapatkan hasil-hasil kerja dari anggota lainnya—terjadinya penindasan dan penghisapan. Dengan demikian masyarakat komunal primitif pun lenyap dan masyarakat telah terbagi dalam klas-klas sosial berdasarkan hak-milik perseorangan atas atas alat-alat produksi. Adanya klas sosial yang memiliki alat produksi dan yang tidak memiliki alat produksi, yang menindas dan yang ditindas, pada akhirnya menciptakan kontradiksi, pertentangan yang tidak terdamaikan, antagonisme klas atau perjuangan klas. Pada prinsipnya, uarain diatas telah membuktikan awal sejarah perkembangan masyarakat hingga dewasa ini yang menurut Marx, ialah “sejarah perjuangan klas”.

⁴² Perubahan kognitif menurut Jean Piaget (1896-1890) adalah kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Singkatnya, tahap perkembangan konsep kecerdasan, perubahan pola pikir. (Sumber: wikipedia.org).

b) Masyarakat Pemilikan Budak

Pada fase ini, masyarakat sudah mengenal klas. Masyarakat pemilikan budak merupakan masyarakat berkelas yang pertama, berdasarkan penghisapan/penindasan atas manusia oleh manusia. Klas yang terdapat dalam masyarakat tersebut ialah tuan budak dan budak. Lahirnya sistem perbudakan merupakan Proses perkembangan perdagangan dan kapital pada zaman kuno. Karena proses produksi yang semakin berkembang, pada gilirannya melahirkan barang dagangan, pasar dan uang sebagai alat tukar untuk memudahkan proses jual-beli dalam masyarakat.

Wilayah pasar kemudian lambat laun menjadi kota dan perkampungan menjadi desa, dan pada perkembangan selanjutnya lahirlah negara sebagai pengontrol sosial. D.N Aidit (1963) mengatakan bahwa:

Produksi didalam masyarakat pemilikan budak didasarkan atas kerja kaum budak. Tuan budak dapat hidup mewah dan mempunyai waktu yang cukup untuk urusan-urusan negara, kebudayaan dan kesenian. Dengan demikian terjadi *perpisahan dan pertentangan antara kerja badan dengan kerja otak* yang terus terdapat dalam semua masyarakat berkelas.⁴³

Uraian diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya tuan budak merupakan klas penguasa yang menindas, sehingga mereka pun tidak lagi terlibat dalam proses produksi karena itu menjadi bagian kerja kaum budak. Sedangkan yang dikerjakan oleh tuan budak adalah memikirkan budaya, seni, negara dan teknik

⁴³ *Ibid*, hlm 70.

agar senantiasa sesuai dengan kepentingan akumulasi kapital kelas penguasa. Dengan kondisi yang demikian, tentu saja kaum budak menyadari sistem eksploitasi yang terjadi dan mereka tidak akan tinggal diam. Maka dalam hal ini, pertentangan kelas kemudian tercipta.

Selanjutnya, Marx dan Engels (2013) menerangkan bahwa:

.. struktur masyarakat yang didasari pemilikan komunal dan kekuasaan rakyat ini senantiasa merosot sejalan dengan pemilikan pribadi yang bersifat tetap (unmovable). Pembagian kerja juga sudah lebih berkembang. Pertentangan kota dan desa sudah berlangsung, lalu pertentangan antara negara yang mewakili kepentingan kota dengan yang mewakili kepentingan desa. Pertentangan antara industri dan perdagangan maritim berkembang dikota itu sendiri. Hubungan kelas antara warga kota dan budak sekarang berkembang sepenuhnya.⁴⁴

Hal diatas merupakan penjelasan Marx dan Engels perihal pemusatan pemilikan pribadi pada zaman Yunani dan Romawi kuno dan berkembang pada zaman perang sipil, dibawah kekuasaan para kaisar—yang pada gilirannya memasuki zaman pertengahan sebagai cikal-bakal masyarakat Feodalisme.

c) Masyarakat Feodalisme

Masyarakat feodal biasanya juga disebut masyarakat tuan tanah.

Masyarakat feodal terbagi dari dua kelas pokok, yaitu tuan tanah dan kaum tani

⁴⁴ *Ibid*, hlm 14.

hamba atau tani penggarap. Tuan feodal (ningrat, bangsawan, pendeta) adalah pemilik tanah, sedangkan kaum tani (tani hamba, tani penggarap) hanya berkerja diatas tanah para tuan atau raja—dengan sistem sewah atau upeti. Singkatnya, para tuan tanah hidup dari hasil kerja para kaum tani hamba, sehingga kontradiksi diantaranya tidak dapat dihindari. Berangkat dari proses produksi yang terus berkembang, kemudian lahir pula kaum pedagang atau kaum borjuis—sebagai patner dari kaum feodal. Marx dan Engels (1846) menerangkan bahwa:

Pemilikan selama zaman feodal terutama terdiri dari pemilik tanah dengan buruh tani yang terkait dengannya disatu sisi, dan kerja personal dari pemilik kapital kecil (borjuis kecil) yang memerintah para pedagang disisi lain. Pembagian kerja dalam feodalisme masih sempit dan setiap negeri memuat pertentangan kota dan desa. Pembagian tanah tentu saja ditentukan secara ketat. Namun hanya terdapat dua pemilahan penting: para pangeran, ningrat, pendeta dan buruh tani di desa; dan para tuan, pedagang, pekerja magang dan juga rakyat jelata dari para pekerja harian di kota⁴⁵.

Peneliti menangkap paparan Marx dan Engels tersebut bahwa proses produksi dan tenaga produksi yang semakin berkembang, menyaratkan munculnya kelompok-kelompok baru dalam masyarakat yang terbagi dari dua klas pokok sebelumnya (Tuan tanah dan tani hamba). Sebab, proses pertukaran barang-barang yang semakin meningkat, kemudian di kota pun melahirkan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 16.

pedagang yang bertindak sebagai perantara (tengkulak). Pada gilirannya, penduduk semakin meningkat, kebutuhan hidup bertambah, dan pasar pun dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Para borjuis pun mulai membangun pabrik atau industri untuk meningkatkan produksi—maka lahir pula klas baru, yakni klas buruh. Kondisi tersebut menarik perhatian tuan feodal untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produksi barang kebutuhan yang telah meningkat pesat, yakni menaikan pajak, upeti dan beban kerja kepada tani hamba. Disamping itu, para pedagang pun merasa terganggu dengan pemberlakuan pajak dan upeti dari tuan feodal. Dengan demikian eksploitasi pun semakin kejam. Untuk melindungi diri dari tindasan tuan feodal, kemudian mereka membentuk perkumpulan-perkumpulan yang di sebut “gilda”.

Dari uraian diatas, artinya bahwa para pedagang, tukang, pengrajin, dan lainnya juga berupaya untuk mengamankan modal mereka dari ancaman feodal. Selanjutnya, pada tingkat perkembangan tertentu dalam masyarakat feodalisme telah berlangsung dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi feodal yang berbasis agraris dan ekonomi yang berbasis barang dagangan atau ekonomi pasar. Karena pasar yang terus meningkat, fungsi uang yang sebelumnya hanyalah sekedar alat tukar semata—kini memiliki nilai lebih (*surplus value*) dan menjadi alat penimbunan kekayaan sebagai modal (*capital*). Artinya, posisi kaum borjuis disatu sisi menjadi kekuatan baru yang mengancam kejayaan para tuan feodal, dan disisi lain kaum tani hamba juga ingin membebaskan dirinya dari penghisapan kaum feodal. Konsekuensinya, pertentangan melawan kekuasaan feodal pun semakin tajam. Setidaknya, kaum tani hamba dan kaum borjuis memiliki kepentingan umum yang sama, yaitu

sama-sama merasa terhisap atas pemberlakuan upeti dan pajak dari tuan feodal. Darsono Prawironegoro (2012), melanjutkan bahwa:

Ketidakpuasan kaum borjuis dan kaum tani hamba meledak dan akhirnya menimbulkan aksi-aksi serta perlawanan yang menentang ketentuan-ketentuan dan tindakan-tindakan raja feodal yang memberatkan itu. Maka akhirnya hubungan feodalisme hancur dan diganti dengan hubungan produksi kapitalisme yang sesuai dengan perkembangan tenaga produktif. Dalam proses perkembangan kaum borjuis lebih lanjut timbul gerakan yang menyatukan wilayah kekuasaan ekonomi. Kondisi yang demikian itu disebut "*Revolusi Borjuis*" yaitu revolusinya kaum borjuis melawan kaum feodal⁴⁶.

Berangkat dari paparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa, perkembangan corak produksi dan hubungan produksi pada zaman feodalisme tidak dapat lagi dipertahankan, karena kemajuan alat produksi pada masa itu telah dikuasai oleh kaum borjuis—dimana mereka mengendalikan pabrik atau industri dan pasar, sehingga mereka menjadi domain baru dalam suatu tatanan masyarakat.

d) Masyarakat Kapitalisme

Dalam fase masyarakat kapitalis, secara umum masyarakat terbagi dalam dua kelas yakni, kelas kapitalis atau borjuasi dan kelas pekerja atau proletariat.

D.N Aidit (1963) menulis:

⁴⁶ *Ibid*, hlm 109.

Buruh bukan milik si kapitalis; buruh tidak dapat dibeli atau dijual. Ia nampaknya bebas, tetapi ia tidak mempunyai alat-alat produksi samasekali sehingga terpaksa menjual tenaganya kepada pemilik alat-alat produksi, yaitu si kapitalis – pemilik pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan lain, dan ia (buruh/klas pekerja) harus berkerja membanting tulang supaya tidak mati kelaparan⁴⁷.

Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwa dalam masyarakat kapitalisme, klas borjuasi (pemilik alat produksi) dalam corak produksinya menjadi kaum penghisap yang mendapatkan laba (nilai lebih) dari kerja-kerja produksi kaum proletariat (buruh/klas pekerja). Sedangkan massa pekerja hanya mendapat upah yang tidak setimpal dari nilai lebih yang didapati oleh klas borjuis, semakin lama klas buruh semakin terhisap, menderita kesengsaraan dan kemelaratan.

Kapitalisme, dalam perkembangannya juga melahirkan kontradiksi-kontradiksi yang tidak terelakan. Tony Cliff (2020) dalam bukunya “*Marxisme Abad 21*”, juga menerangkan hal serupa bahwa:

Di dalam sistem ekonomi-politik kapitalisme, mereka yang berkerja tidak memiliki alat-alat produksi, sedangkan mereka yang memiliki alat-alat produksi tidak berkerja. Kepemilikan alat-alat produksi ada ditangan individu-individu, korporasi-korporasi kapitalis, atau negara-negara⁴⁸.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 71.

⁴⁸ Tony Cliff, “*Marxisme Abad 21*”. Edisi Indonesia, (cetakan pertama: Red Book 2020). Hlm 2.

Artinya, kepemilikan alat-alat produksi secara individual inilah yang pada gilirannya akan menciptakan kontradiksi, baik disesama kapitalis itu sendiri karena persaingan pasar maupun klas kapitalis dan klas proletariat. Hal ini dipengaruhi atas berkembangnya ekonomi kapitalis dengan terbentuknya kapital dan timbulnya industri. Sebab, hukum pokok ekonomi kapitalis adalah *ekonomi barang dagangan*—yang sifatnya ialah memproduksi barang-barang untuk dijual ke pasar sebagai jalan untuk mendapatkan laba. Lebih lanjut, Darsono Prawironegoro (2021), menjelaskan bahwa:

Proses produksi barang dagangan hakikatnya adalah proses produksi yang menghisap kaum buruh, cara produksi kapitalis yang memproduksi barang dagangan adalah merupakan suatu permulaan jaman penghisapan atas tenaga kerja buruh sebagai proses kemajuan alat kerja dan perkembangan tenaga kerja, kemudian mentransformasikan diri menjadi basis ekonomi masyarakat dan selanjutnya berkembang sampai jaman sekarang ini. Dengan demikian, masyarakat kapitalisme itu tujuan pokoknya ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dijadikan kekayaan⁴⁹.

Dari paparan tersebut diatas, peneliti menemukan inti sarinya, bahwa watak daripada sistem masyarakat kapitalisme ialah betumpu pada logika *mencari keuntungan yang sebesar-besarnya*. Tak heran, jika dalam perkembangannya hingga saat ini persaingan pasar dan industri semakin bergejolak, dan disaat yang bersamaan terjadi eksploitasi tenaga buruh dan alam yang semakin tajam.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 111-112.

Berangkat dari uraian diatas, bagi peneliti, eksploitasi yang terjadi dalam masyarakat kapitalis, masih sulit dimengerti oleh massa rakyat (khususnya kaum buruh sebagai kos-produksi dalam industri kapitalis). sebab, melalui sistem kerja upahan, sistem premi, sistem lembur, dan lain-lain—mengkondisikan penghisapan kapitalis terhadap kerja kaum buruh menjadi sangat tidak kentara, jika tidak dicermati secara mendalam dan kritis. Alhasil, kebanyakan kaum buruh saat ini masih tidak menyadari bahwasanya ia hidup didalam cengkraman penindasan dan penghisapan kapitalisme. Namun dalam tahap lebih lanjut, disaat klas pekerja telah memahami watak dan karakter dari corak produksi kapitalisme, atau dengan kata lain, ketika klas pekerja telah memiliki kesadaran klas yang mempunyai dalam arti menyadari dirinya sebagai klas yang tertindas—maka dalam kondisi inilah klas pekerja akan tumbuh menjadi kekuatan yang menentukan dan menjadi penggerak sejarah—yang akan memelopori perubahan sistem masyarakat, yakni menghancurkan sistem kapitalisme dan mentransformasikan sistem sosialisme yang sesuai dengan tingkat perkembangan tenaga produktif.

Sebab, persaingan merupakan ciri khusus dalam sitem kapitalisme. Sehingga persaingan itulah yang akan mendorong adanya akumulasi modal, konsentrasi perusahaan-perusahaan, kesengsaraan klas pekerja, kelebihan produksi, krisis ekonomi, sosial dan politik. Artinya, dalam keadaan yang demikian klas pekerja akan tampil sebagai kekuatan revolusioner, yang mengadakan *rovolusi*—merebut kekuasaan politik dan mengambilalih kekuasaan alat-alat produksi dari tangan individu-individu kapitalis, untuk dijadikan milik bersama seluruh masyarakat. Dengan demikian, hubungan produksi kapitalisme (kepemilikan alat-alat produksi secara individual dan

menindas), diganti dengan hubungan produksi sosialisme (kepemilikan alat-alat produksi secara bersama dan tidak menindas, setara).

e) Masyarakat Sosialisme

Dalam fase masyarakat sosialisme, alat-alat produksi tidak lagi dimiliki secara individual oleh segelintir orang kaya atau golongan-golongan pemodal (borjuasi, korporasi dan investor) yang dalam proses produksinya justru menindas orang lain (massa rakyat pekerja). Kemudian dalam masyarakat sosialis akan mengkondisikan kepemilikan alat-alat produksi secara bersama oleh masyarakat dibawah kepemimpinan negara klas pekerja. Namun ini hanya bisa tercapai dengan aktivitas (gerakan) revolusioner dari massa rakyat pekerja, yang secara sadar menenyapkan segala sistem dan bentuk penghisapan atas manusia oleh manusia. lebih lanjut, penindasan kapitalisme dapat diakhiri dengan *revolusi sosialis*—yang menghapuskan kepemilikan alat-alat produksi perseorangan, dengan demikian maka klas-klas sosial dalam masyarakat pun akan turut melenyap. Itulah sosialisme.

Revolusi ialah penghancuran kekuasaan yang ada dan menghancurkan hubungan sosial (sistem sosial) yang ada, itu adalah suatu aktivitas (gerakan) politik. Tanpa revolusi, sosialisme tidak dapat dibangun. Lebih lanjut, Darsono Prawironegoro (2012), juga menerangkan bahwa:

Masyarakat sosialis lahir dari perjuangan revolusioner klas buruh atau kaum proletar dalam menghancurkan kapitalisme. Masyarakat sosialis itu berdiri diatas dasar pemilikan alat-alat produksi oleh negara dibawah *pemerintahan diktatur proletariat*, untuk kepentingan hidup seluruh masyarakat dalam hubungan produksi dan sistem ekonomi sosialis. Itu berarti bahwa untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi dan masyarakat sosialis harus melalui

revolusi proletariat, tidak dapat dicapai dengan jalan damai atau tanpa revolusi⁵⁰.

Dari ulasan diatas, peneliti hendak menggarisbawahi perihal “pemerintahan diktatur proletariat”. Sebab, kebanyakan kaum akademik dan cendekiawan borjuis cenderung memplesetkan makna kalimat tersebut dengan anggapan bahwa, “negara dalam sistem sosialisme dengan pemerintahan diktatur proletariat akan menjadi pemerintahan otoriter dan anti-demokrasi”. Tuduhan ini selalu memojokkan kaum *marxist* ketika berbicara revolusi sosialis. Alhasil, propaganda kaum borjuis dalam upaya melanggengkan sistem kapitalisme selalu menciptakan stigma buruk bagi kemunculan gagasan revolusi atau sosialisme, khususnya di Indonesia hingga sekarang ini. Propaganda yang dimaksud, misalnya, pengembangan pengetahuan dalam dunia pendidikan yang—menurut Foucault (2002) bahwa kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan yang mengekspresikan kepentingan kaum borjuis—dimana moralitas yang diajarkan di sekolah-sekolah sebenarnya merupakan suatu pembebanan bertahap dari sistem nilai yang secara keseluruhan menyamar dalam bentuk pengajaran kesusastraan, baca dan tulis yang mencakup pembebanan nilai-nilai tersebut⁵¹. Disini Foucault mencoba menunjukkan bagaimana mereka semua (kaum borjuis, kekuasaan dan pengetahuan) saling berhubungan dan bagaimana kaum proletar—“dipaksa

⁵⁰ *Ibid*, hlm 115.

⁵¹ *Ibid*, hlm 27.

menerima”—pada titik tertentu, bersesuaian dengan ideologi moral kaum borjuis.

Dalam pemikiran sosio-politik Marxis, diktatur proletariat merujuk pada negara sosialis dimana kaum proletar (klas buruh/pekerja) sebagai pemegang kekuasaan politik yang terorganisir. Dalam perkembangannya, penggunaan kata “diktatur” selalu dimaknai secara kontraversi bahwa akan menghilangkan proses demokrasi. Sejatinya, dalam konteks negara sosialis, anggapan tersebut berlainan makna dan prakteknya. Yang dimaksudkan “diktatur proletariat” bagi Marx dan Engels (1848) ialah sebagai berikut:

Bahwa langkah pertama dalam revolusi kelas buruh, adalah mengangkat proletariat pada kedudukan kelas yang berkuasa, memenangkan perjuangan demokrasi. Proletariat akan menggunakan kekuasaan politiknya untuk merebut, selangkah demi selangkah, semua kapital dari borjuis, memusatkan semua perkakas produksi ke dalam tangan negara, artinya, proletariat yang terorganisasi sebagai kelas yang berkuasa; dan untuk meningkatkan jumlah tenaga-tenaga produktif secepat mungkin.⁵²

Jika menyimak yang diungkapkan oleh Marx dan Engels diatas, maka pemerintahan diktatur proletariat yang dimaksud adalah sebagai “jalan transisi” menuju masyarakat sosialis—yang dimana kediktaturan proletariat dibutuhkan—untuk merebut dan mengambilalih alat-alat produksi dari tangan klas borjuis dan dikonsentrasikan ke dalam negara sosialis; yang bertujuan

⁵² *Ibid*, hal 63-64.

untuk menghilangkan kepemilikan pribadi dan menjadikan alat-alat produksi tersebut menjadi milik bersama, secara sosial—dibawah kontrol kepemimpinan klas buruh/pekerja. Hal tersebut sejalan dengan yang sudah tersampaikan sebelumnya, bahwa salah satu syarat untuk penghapusan klas-klas dalam masyarakat, maka kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi harus terlebih dahulu dihapuskan. Dengan demikian, jika klas-klas dalam masyarakat telah lenyap (termasuk proletariat), maka dengan sendirinya kediktaturan proletariat pun tidak relevan dipertahankan, juga turut melenyap. Marx dan Engels (1848) lebih lanjut menulis:

Apabila, dalam perjalanan perkembangan, perbedaan-perbedaan kelas telah hilang, dan seluruh produksi telah dipusatkan ke dalam tangan suatu perserikatan luas dari seluruh nasion, kekuasaan umum akan hilang watak politiknya. Kekuasaan politik, menurut arti kata yang sesungguhnya, hanyalah kekuasaan terorganisasi dari suatu kelas untuk menindas kelas yang lain. Apabila proletariat selama perjuangannya melawan borjuasi terpaksa, karena tekanan keadaan, mengorganisasi dirinya sebagai kelas, apabila, dengan jalan revolusi, ia menjadikan dirinya kelas berkuasa, dan, sebagai kelas yang berkuasa, menghapuskan dengan kekerasan hubungan-hubungan produksi yang lama, maka ia, bersama-sama dengan syarat-syarat ini akan menghilangkan untuk adanya antagonisme-antagonisme kelas dan adanya

kelas-kelas pada umumnya, dan dengan demikian akan menghapuskan kekuasaannya sendiri sebagai kelas.⁵³

Dari uraian diatas, bagi peneliti, Marx dan Engels kembali menegaskan bahwa watak dari kekuasaan politik itu sendiri adalah sebagai instrumen penindasan dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Dengan demikian, tugas dalam diktatur proletariat adalah untuk menghapus kelas-kelas dalam masyarakat pada umumnya dengan tujuan mengakhiri adanya antagonisme kelas serta penindasan dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Jadi, penerapan diktatur proletariat hanyalah “sementara”, untuk memastikan proses penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan penghapusan kelas-kelas dalam masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Sebab, dalam proses transisi ini, kaum proletariat secara sadar menyadari bahwa kaum berjuis dan kroni-kroninya tidak akan secara sukarela melepaskan sesuatu yang telah mereka miliki dan nikmati. Dan untuk mempertahankan kepemilikannya, maka mereka (kaum kapitalis) juga akan melakukan berbagai upaya perlawanan untuk mempertahankan/merebut kembali kekuasaan ekonomi-politik yang selama ini telah ia nikmati. Disinilah diktatur proletariat berfungsi, yaitu untuk menangkalkan aktivitas (gerakan) yang kontra-revolusi atau untuk menekan pihak-pihak yang anti perubahan.

Kondisi diatas mencerminkan tahapan awal dalam masyarakat sosialis, bahwa kelas-kelas dalam masyarakat tidak sepenuhnya hilang atau melenyap.

⁵³ *Ibid*, hal 65.

Namun masih terdapat sisa-sisa klas yang terbentuk dari sistem sosial sebelumnya, yaitu pada fase feodalisme maupun kapitalisme. Darsono Prawironegoro (2012) menulis:

Dalam masyarakat sosialis masih ada klas-klas, yaitu klas buruh atau klas proletariat, sisa-sisa klas borjuis dan sisa-sisa klas feodal. Oleh sebab itu klas buruh dalam masyarakat sosialis masih harus berjuang keras mengalahkan serta mengikis habis sisa-sisa perasaan dan pikiran klas-klas borjuis dan klas feodal. Karena klas-klas borjuis dan klas feodal itu masih berpikir dan berusaha untuk bisa terus memiliki secara individu atas alat-alat produksi. Maka dalam masyarakat sosialis perjuangan klas belum berakhir.⁵⁴

Sehubungan dengan uraian diatas, yang menjadi pertanyaan lebih lanjut dalam masyarakat sosialis adalah bagaimana kemudian negara sosialis menjalankan sistem ekonominya? Tentu saja, perihal alat-alat produksi yang menjadi milik bersama dan dikelola secara bersama dibawah kontrol negara klas pekerja menjadi dasar pikir utamanya dalam menjelaskan sistem ekonomi sosialis. Singkatnya, ekonomi masyarakat sosialis merupakan suatu sistem ekonomi yang watak tenaga produktifnya sesuai dengan hubungan produksinya, yaitu watak tenaga produktif kolektif dan sifat hubungan produksinya juga kolektif. Artinya, sistem kerja kolektif tersebut mengisyaratkan bahwa tidak adanya tuan dan majikan atau bos. Dengan demikian, hubungan produksi dalam masyarakat sosialis tidak mengandung kontradiksi yang antagonis, karena

⁵⁴ *Ibid*, hal 116.

tidak adanya relasi produksi yang menindas antara satu dengan yang lainnya.

Lebih lanjut, Darsono Prawironegoro (2012) menerangkan bahwa:

Dalam masyarakat sosialis, industri dikelola oleh negara. Jumlah produksi ditetapkan oleh negara atas dasar kebutuhan seluruh rakyat. Upah kerja didasarkan atas dasar hasil kerja dengan berdasarkan pada basis upah minimum, yang sesuai dengan basis keperluan hidup materill dan keperluan hidup spritual. Prinsip ekonomi masyarakat sosialis ialah mandiri, berdasar pada kebutuhan pasar dalam negeri, yaitu kebutuhan seluruh rakyat.⁵⁵

Dari paparan diatas, sejalan dengan pandangan umum kaum marxis dalam menjalankan ekonomi sosialis, yaitu “setiap orang berkerja sesuai kemampuan dan mendapatkan upah sesuai hasil kerja”, dengan standar upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Kondisi ini berbeda dalam masyarakat kapitalis, walaupun sistem produksi sudah berwatak sosial, yakni dikerjakan oleh banyak orang, namun alat-alat produksi tetap dimiliki secara pribadi/perseorangan. Inilah dasar dari penghisapan dan penindasan yang menyebabkan pembelengguan kekuatan produksi, kemiskinan manusia dan kehancuran bumi. Maka dalam masyarakat sosialis watak pemilikan alat produksi diubah menjadi sesuai dengan watak produksinya, yaitu milik sosial atau kolektif. Dengan dimilikinya alat-alat produksi secara sosial (bersama), maka kekuatan produksi pun terbebas dari belenggu pengaturan pribadi dan demi keuntungan pribadi. Pabrik-pabrik, teknologi, mesin-mesin produksi,

⁵⁵ *Ibid*, hal 116.

tanah, dan kekayaan alam lainnya tidak lagi boleh dimiliki secara perseorangan, karena pengerjaannya berasal dari banyak orang, maka kegunaanya juga untuk banyak orang. konsekuensi dari dimilikinya alat produksi dan perencanaan produksi secara sosial, maka corak produksi pun tidak lagi berdasarkan pada keuntungan pribadi, melainkan didasarkan pada kebutuhan sosial, seluruh rakyat. Artinya, setiap produksi akan dilakukan dengan perhitungan atas jenis dan jumlah kebutuhan sosial masyarakat.

Berangkat dari uraian mengenai filsafat Materialisme Dialektika Historis (MDH) diatas—merupakan landasan utama baik secara teori maupun praktek dalam Marxisme. Melalui materialisme dialektika sebagai metode, kemudian mampu menjelaskan bagaimana proses gerak perubahan dan perkembangan segala hal ikhwal, yakni hukum kontradiksi atau pertentangan klas-klas dalam masyarakat merupakan sejarah dalam perkembangan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Setiap pergantian atau transisi dari satu sistem sosial ke sistem sosial yang lainnya tidak terlepas dari perjuangan klas itu sendiri. Begitu juga yang terjadi dalam peralihan dari fase kapitalisme ke sosialisme, dimana klas proletariat lahir sebagai kekuatan produktif yang memelopori aktivitas (gerakan) revolusioner. Artinya, sosialisme lahir sebagai *antitesis* dari sistem kapitalisme atas dasar perkembangan tenaga produktif dan hubungan produktif itu sendiri.

Sosialisme adalah sebuah ideologi sekaligus corak produksi yang satu-satunya dapat melampaui kapitalisme. Melampaui yang dimaksud adalah menggunakan capaian-capaian kapitalisme—khususnya teknologi produksi, sebagai sistem hubungan produksi yang berlawanan sama sekali dengan kapitalisme. Singkatnya, sosialisme berarti kepemilikan kolektif atas tuas-tuas ekonomi penting dan perencanaan ekonomi secara demokratik oleh kaum buruh/pekerja. Sosialisme akan menghancurkan sumber *privilege* klas kapitalis yang berkuasa, dengan merebut alat-alat produksi dari tangan kapitalis dan meletakkannya ke

tangan massa rakyat pekerja. Perjuangan sosialis akan bersifat revolusioner karena ia akan merubah secara total tatatan masyarakat yang ada sekarang ini (kapitalisme). Perjuangan sosialis juga akan bersifat demokratik, dan itu merupakan keharusan, karena ia merupakan perjuangan yang melibatkan mayoritas massa rakyat pekerja (buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pegawai kantoran, guru, dan rakyat tertindas lainnya) untuk menentukan nasibnya sendiri. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah ditengah dominasi kapitalisme dewasa ini. Maka untuk mencapai itu, pondasi awalnya adalah massa rakyat tertindas harus membangun kekuatannya dengan persatuan pada tahap lebih tinggi, yakni partai—sebagai alat untuk pendidikan politik dan perang wacana sosialisme melawan wacana kapitalisme. Michel Foucault (2002) juga menegaskan bahwa:

Kita harus menemukan suatu cara untuk mengklasifikasikan perjuangan melawan bentuk-bentuk keterasingan ini, penyatuan ide yang berasal dari semua faksi-faksi masyarakat yang berbeda-beda—sebuah penyatuan yang mampu menyatukan kembali semua faksi masyarakat yang telah terpecah belah—karena bukan dengan gagasan yang menjadikan sejarah dibuat bergerak maju, melainkan tersusun dari kekuatan material, yakni orang-orang yang bersatu di jalanan⁵⁶.

Oleh karenanya, bagi peneliti, dalam menghadirkan suatu wacana politik alternatif yang bertendensi Marxisme, maka yang menjadi rujukan utamanya adalah sosialisme sebagai *antitesa* dari kapitalisme (suatu sistem ekonomi-politik yang sedang berkembang sekarang ini). Seperti yang sudah peneliti paparkan diawal, bahwa kemunculan gagasan wacana politik alternatif, tidak terlepas daripada sistem ekonomi-politik kapitalisme yang

⁵⁶ *Ibid*, hlm 32.

dianggap gagal dalam mengakomodir kepentingan massa rakyat. Sebab kapitalisme adalah sumber penindasan dan kehancuran peradaban umat manusia saat ini, sedangkan oligarki-neoliberal merupakan jalan terselubung dari perkembangan kapitalisme-imperialisme itu sendiri.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan batasan yang digunakan untuk memfokuskan penelitian dalam pencarian data dan informasi agar dapat berjalan sesuai dengan yang menjadi kebutuhan penelitian. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan konsep wacana politik alternatif dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat. Hal ini dilakukan agar proses penelitian lebih terarah dengan alasan untuk menggambarkan sejauh mana capaian-capaian yang telah diperoleh dalam upaya pembangunan partai massa rakyat sebagai partai alternatif. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Sistem partai massa rakyat menurut Kesatuan Perjuangan Rakyat;
2. Tujuan pembangunan partai massa rakyat oleh kesatuan perjuangan rakyat;
3. Perencanaan yang dilakukan oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam upaya pembangunan partai massa rakyat;
4. Strategi yang dilakukan dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat;
5. Capaian yang diperoleh dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat;
6. Hambatan dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Lexy. J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁵⁷.

Pengertian “kualitatif” menurut Sutopo dan Arief (2016) menyimpulkan beberapa pendapat tentang pengertian kualitatif, yaitu: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok; 2) kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden atau responden terhadap dunianya (*etnik* atau *verstehen*) yang selalu majemuk, berbeda dan dinamis; 3) bersifat menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan (*to describe, explore, and explain*).

Dalam hal ini, tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan fakta dan keadaan di lapangan dalam proses sosial politik organisasi. Oleh karenanya, melalui penelitian ini, permasalahan yang hendak diteliti adalah untuk mengetahui proses *Agenda Setting* Pembentukan Partai Politik Alternatif dalam Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat oleh Organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat.

2. Lokasi Penelitian

⁵⁷ Lexy. J. Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hlm 4.

Penelitian ini dialamatkan ke organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat atau KPR, Badan Pekerja Daerah (BPD) Yogyakarta yang bertempat di Kota Jogja. Alasan peneliti memilih penelitian di Kesatuan Perjuangan Rakyat karena KPR merupakan salah satu organisasi gerakan rakyat (dari banyaknya gerakan rakyat) yang telah secara masif mengkampanyekan atau melakukan aktivitas agitasi dan propaganda tentang Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat—sebagai partai politik alternatif. Artinya, dengan pemilihan lokasi penelitian di Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Pengrus Harian di Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dalam hal ini Badan Pekerja Daerah (BPD) Yogyakarta. Terdapat beberapa informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun daftar informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar Informan Kesatuan Perjuangan Rakyat Badan Pekerja Daerah Yogyakarta

No.	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Kedudukan
1.	Restu Baskara	36 Tahun	Laki-laki	S-1	Ketua BPD-KPR Yogyakarta
2.	Irhas	29 Tahun	Laki-laki	S-2	Sekretaris Jendral
3.	Ferry Taupik	33 Tahun	Laki-laki	S-2	Departemen Pendidikan dan Penelitian
4.	Pratama Wasisto	27 Tahun	Laki-laki	S-2	Departemen Media dan Kampanye
5.	Agus Rahmat	25 Tahun	Laki-laki	S-1	Departemen Usaha Bersama

6.	Rian Santula	25 Tahun	Laki-laki	S-1	Departemen Organisasi dan Jaringan
7.	Asmara Dewo	34 Tahun	Laki-laki	S-1	Departemen Advokasi
8.	Wahid Hermawan	26 Tahun	Laki-laki	S-1	Simpatisan
9.	Agus Nurdin	27 Tahun	Laki-laki	S-2	Simpatisan
10.	Ahyar	28 Tahun	Laki-laki	S-2	Simpatisan

4. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode kualitatif pada prinsipnya bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala, fakta atau realitas, gejala, peristiwa serta masalah yang hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Oleh karenanya, meminjam kutipan dari Creswell (2012), ia menyatakan bahwa “pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita atau informasi dari pelaporan pengalaman individu atau kelompok dan membahas arti pengalaman tersebut”.

Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 134), baginya, teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan Ibnu Hadjar (1996: 160), berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang variasi karakteristik variabel secara obyektif.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama mengenai segala sesuatu yang ada dalam alam semesta;

dengan kata lain, meminjam kutipan Pramoeda (1980) yaitu perihal “*bumi manusia dan segala persoalannya*”.

Kegiatan penelitian mulanya hanya diarahkan pada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan tentang lingkungan alam manusia, hubungan antar manusia seperti jenis dan tumbuhan, sifat jenis binatang, kemudian pada usaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas seperti kegiatan manusia, hubungan antar manusia dan sebagainya (Harsya W. Bachtiar, 1985: 110). Pada prinsipnya, dalam observasi penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana proses *Agenda Setting* yang dilakukan oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam Upaya pembangunan Partai Massa Rakyat—sebagai Wacana Politik Alternatif.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara, menurut Esterbeg dalam Sugiono (2010: 72), menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang dapat menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wawancara setidaknya dilakukan antar dua orang atau bahkan lebih, yang saling bertemu atau tatap muka, melakukan sharing ide dan pengalaman, dan mengkonstruksikan suatu makna tentang obyek atau fenomena tertentu.

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan hendak mendalami mengenai Dinamika Kesatuan Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat sebagai Wacana Politik Alternatif.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincon (2002:161), memaparkan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang tidak terpisahkan karena ada permintaan

seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat notulen rapat dan sebagainya. Artinya, peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lebih lanjut, dokumen pada hakikatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang telah diarsipkan. Dokumen dibedakan dengan record, yang artinya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akun penting misalnya surat nikah, akte kelahiran, bukti setoran pajak dan lain-lain.

Dari uraian diatas, dalam hal ini peneliti akan meneliti proses *Agenda Setting* Pembentukan Partai Politik Alternatif dalam Upaya Pembangunan Partai Massa Rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat. Dokumen penting dalam hal ini adalah file, data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian—seperti profil organisasi, konstitusi organisasi, platform organisasi, dan program kerja organisasi.

5. Teknik Analisis Data

Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dapat mengungkapkan suatu masalah khususnya yang berkaitan dengan proses *agenda setting* yang dilakukan oleh KPR dalam proses pembentukan partai politik alternatif. Selanjutnya, dalam hal analisis data, diperlukan penafsiran (*interpretation*) terhadap data-data (teks, rekaman, gambar dan dokumen lainnya) yang telah dihimpun, kemudian diklasifikasi dan dikategorisasikan guna memunculkan suatu ide yang berkembang menjadi tema-tema (Creswell: 2012). Adapun langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu:

- a. Identifikasi masalah atau fenomena yang akan dieksplorasi.
- b. Pilih satu atau lebih subyek penelitian untuk dipelajari, menyajikan dan menarasikan data.

- c. Kumpulkan cerita atau informasi dari subyek penelitian yang dipilih.
- d. Validasi keakuratan data.
- e. Membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

BAB II

TENTANG FRONT KESATUAN PERJUANGAN RAKYAT

A. Sejarah Front Kesatuan Perjuangan Rakyat

Membangun front persatuan adalah sebuah tahapan kerja menuju pembangunan partai massa. Karena terdapat keterbatasan kerja-kerja organisasi dalam memperjuangkan hak ekonomi-politik dimasing-masing organisasi massa (ormass), sehingga keterbatasan tersebut harus dijawab dengan bentuk dan isi persatuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya, persatuan multisektor merupakan jembatan menuju pembangunan partai massa sebagai solusi atas keterbatasan tersebut.

Kondisi diatas kemudian melatarbelakangi kebutuhan tentang pembangunan “Front Politik” Kesatuan Perjuangan Rakyat atau KPR menuju partai massa. Pembangunan “Alat Politik Alternatif” memang sudah lama dicita-citakan oleh gerakan rakyat Indonesia dan khususnya di internal KPR. KPR Pertama kali muncul sebagai aliansi/komite aksi saat memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional pada tahun 2004-2005. Awalnya, persatuan ini muncul dalam bentuk aliansi dengan nama Komite Perjuangan Buruh (KPB) dan kemudian berganti nama menjadi Komite Perjuangan Rakyat (KPR), yang didalamnya terdapat beberapa unsur organisasi massa seperti Komite Pendidikan Bersama Indonesia (KPBI) atau pada saat itu sebagai Komite Persiapan Serikat Mahasiswa Indonesia (KP-SMI), Gerakan Mahasiswa Jabodetabek (GMJ), Serikat Pemuda Djakarta (SPEED), Forum Komunikasi Buruh Cikarang (FKBC), Komite Advokasi Buruh (KAB), serta organisasi lainnya yang pada saat itu terlibat dalam aliansi. Tujuan awal adanya persatuan ini adalah sebagai forum komunikasi dan koordinasi lintas organisasi untuk tetap dalam satu koridor perjuangan, saling mengisi dan saling bersolidaritas atas perjuangan yang dilakukan.

Dalam dinamikanya, aliansi Komite Perjuangan Rakyat terus berkembang, sehingga ada kebutuhan untuk membentuk koordinator, yang berfungsi untuk mengkoordinir persatuan multisektor ini. KPR disebut sebagai persatuan multisektor karena di dalamnya terdapat unsur organisasi buruh, mahasiswa, pemuda, kaum miskin kota, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karena komunikasi yang intens dari setiap unsur organisasi massa yang ada di dalamnya, pada gilirannya kegiatan KPR tidak sekedar konsolidasi dan aksi, tetapi juga mulai melakukan kegiatan pendidikan bersama, *live in*, membentuk forum belajar, pelatihan advokasi, pelatihan pengorganisasian dan lain-lain. Tujuan dari program atau kegiatan tersebut ialah sebagai uji kerja, seleksi dan pengkaderan ex-mahasiswa guna menjadi tenaga pengorganisasian buruh, pemuda dan sektor rakyat lainnya.

Semenjak awal terbentuknya Komite Perjuangan Rakyat (KPR), dalam proses konsolidasi setiap unsur organisasi di dalamnya sudah muncul gagasan-gagasan mengenai pembangunan alat politik alternatif atau partai yang lahir dari gerakan rakyat (bukan akuisisi partai yang sudah ada). Hal ini dimulai dengan mengkualitaskan unsur organisasi massa yang ada di dalamnya, seperti Komite Pendidikan Bersama Indonesia (KPBI, 2001) dan menjadi Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI, 2006); Forum Komunikasi Buruh Cikarang (FKBC, 2002) yang menjadi Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ, 2006) dan kemudian menjadi Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI, 2013); Serikat Pemuda Djakarta (SPEED, 2002), menjadi Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP, 2009) dan kemudian menjadi Barisan Masyarakat Indonesia (BMI, 2017); dan pada 2008 bergabung juga Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) dan saat ini sedang mempersiapkan pembentukan serikat pekerja kereta api yang bersifat nasional.

Berangkat dari kondisi obyektif dan subyektif dalam pengkualitasan unsur organisasi massa di dalam KPR, maka pada bulan februari tahun 2017 KPR melakukan konsolidasi nasional pertama di Bogor, yang dihadiri empat unsur ormass (SMI, FPBI, SPKAJ dan KPOP/BMI). Konsolidasi ini bertujuan untuk “menyatukan gagasan politik persatuan” dan mengkualitaskan pembangunan KPR yang sebelumnya masih sebatas komite aksi. Dari hasil konsolidasi nasional tersebut, kemudian melahirkan beberapa program minimum dibidang Ideologi, Politik dan Organisasi (IPO). *Pertama*, dalam bidang ideologisasi kemudian dilakukannya Pendidikan Politik Nasional (PPN) dan Pendidikan Politik Daerah (PPD); *kedua*, dalam bidang politik mendorong setiap unsur ormass KPR untuk melakukan tindakan politik melalui konsolidasi-konsolidasi dengan gerakan rakyat lainnya, untuk merespon momentum dan isu-isu mendesak rakyat serta melakukan kampanye gagasan persatuan multisektor disetiap daerah; *ketiga*, program dalam bidang organisasi adalah merekomendasikan dalam jangka waktu dua tahun akan melakukan Kongres Nasional, untuk mengubah bentuk KPR dari “Komite Aksi” menjadi “Front Politik”.

Pada akhirnya, tepat pada tanggal 24-26 agustus 2018 KPR melakukan “KONGRES I” di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kongres tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi massa (ormass) yaitu Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) dan Barisan Masyarakat Indonesia (BMI). Keempat ormass tersebut sepakat membentuk “Front Politik” yang bersifat persatuan multisektor dan sekaligus menjadi unsur ormass (organisasi anggota) KPR itu sendiri. Kemudian hasil Kongres tersebut melakukan perubahan mana—dari yang sebelumnya bernama Komite Perjuangan Rakyat menjadi Kesatuan Perjuangan Rakyat—dengan singkatan yang sama yaitu KPR.

Selanjutnya, dalam kongres pertama tersebut juga melahirkan strategi dan taktik (stratak) perjuangan, Konstitusi organisasi, Garis Politik dan Platform, Program, dan Struktur Badan Pekerja Nasional - Kesatuan Perjuangan Rakyat (BPN-KPR). Dengan terbentuknya KPR sebagai “Front Politik” yang bersifat multisektor, sejak itu pula, KPR secara organisasional menjadi embrio menuju pembangunan alat politik alternatif atau “Partai Massa Rakyat”.

B. Tujuan Front

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang “*adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya*”. Tujuan tersebut dapat dicicil capaiannya dengan berbagai bentuk perjuangan—baik itu dengan cara parlemen jalanan maupun dalam parlemen—selama hal tersebut tidak bertentangan dengan garis politik front dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjuangan lainnya.

C. Garis Politik dan Platform Perjuangan Front

Adapun Garis Politik⁵⁸ yang disepakati di dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat adalah “Pembebasan Nasional Melawan Imprealisme”. Istilah ini merupakan manifesto perjuangan dalam upaya untuk mewujudkan pembebasan nasional atau kemerdekaan nasional dari dominasi kekuatan asing yang kita sebut sebagai Imprealisme. Berkaca

⁵⁸ Dalam politik, Garis Politik merupakan garis umum partai politik atau gerakan sosial, serta elemen ideologis lainnya sebagai sikap khusus untuk keberpihakan organisasi dan perjuangannya. (Sumber: Wikipedia. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022).

dari kondisi ekonomi-politik Indonesia dewasa ini, nyatanya kekuatan internasional yang menjelma dalam sistem kapitalisme-imperialisme pengaruhnya diberbagai aspek kehidupan massa rakyat masih begitu dominan. Hal ini dapat dilihat, dimana penjajahan imperialis terhadap negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) telah dikondisikan hanya sebagai penyedia bahan mentah untuk kebutuhan industri modern dan sekaligus menjadi pasar untuk produk-produk hasil produksi negara maju. Kondisi ini lambat laun menghilangkan kemandirian negara dalam pengelolaan sumber daya nasional dan bahkan melemahkan peran negara itu sendiri, yang pada puncaknya imperialisme dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi-politik suatu negara yang telah ditaklukkan.

Kontrol dan hegemoni imperialisme—sebagai puncak tertinggi dalam perkembangan kapitalisme—inilah yang menurut KPR harus dilawan atau diperangi untuk mencapai kemandirian bangsa dan kemerdekaan nasional yang sesungguhnya. Namun untuk memutuskan mata rantai imperialisme bukanlah pekerjaan dan perjuangan yang mudah. Sebab, pengaruh kapitalisme-imperialisme yang begitu kuat, telah berjejaring dengan borjuasi nasional guna tetap melanggengkan sistem kapitalisme itu sendiri. Oleh karenanya, perjuangan untuk Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme harus didukung dengan “Platform” perjuangan yang sifatnya prinsipil. Adapun Platform perjuangan Kesatuan Perjuangan Rakyat adalah antara lain:

1. Anti Kapitalisme
2. Tidak Bersekutu Dengan Partai dan/atau Elit Politik Borjuasi
3. Pro Demokrasi
4. Perjuangan Ekonomi dan Politik Adalah Satu Kesatuan

Oleh kerennanya, Garis Politik dan keempat platform perjuangan di atas, merupakan satu kesatuan yang prinsipil bagi KPR dalam menjalankan segala aktivitasnya secara organisasional. Disisi lain, Garis Politik dan Platform tersebut dapat

menjadi “garis demarkasi” yang dapat membedakan orientasi perjuangan KPR dengan kekuatan borjuasi-kapitalis. Hal ini juga berlaku bagi organisasi gerakan rakyat dan elemen massa rakyat lainnya yang hendak bergabung di dalam KPR itu sendiri. Artinya, KPR tetap membuka ruang persatuan seluas-luasnya dengan kelompok manapun selama dia menyepakati garpol dan platform perjuangan tersebut, yang kemudian akan diuji melalui langgam kerja bersama sebagai tolak ukur dalam melihat sejauh mana komitmen persatuan itu sendiri.

D. Mekanisme Front

Mekanisme merupakan pedoman untuk berpikir dan bertindak dalam setiap aktivitas kerja-kerja front. Mekanisme ini berlaku bagi seluruh ormass anggota KPR maupun bagi elemen lain yang hendak bergabung bersama KPR di kemudian hari. Adapun mekanisme front antara lain yaitu:

1. Front perjuangan dipimpin oleh platform politik dan konstitusi yang ditetapkan secara bersama.
2. Setiap struktur kerja (BPN&BPD) dalam pengambilan keputusan harus mempelajari dan memperhatikan laporan, data, informasi, usulan, dan kritik dari organisasi yang tergabung dalam front.
3. Struktur kerja yang lebih tinggi yaitu BPN, harus memperhatikan dan mempelajari setiap kondisi perjuangan serta laporan dari struktur BPD sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan, dan atas suara mayoritas.
5. Setiap tingkatan struktur dibimbing oleh mekanisme evaluasi yang dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai syarat dalam membangun dan memperkuat kolektivisme.

Dari kelima mekanisme yang tertuang di atas, dalam proses pelaksanaannya secara umum dipandu berdasarkan asas demokrasi kerakyatan, yakni Sentralisme Demokrasi (Sendem) dan Kritik oto Kritik (KOK).

E. Pokok-pokok Pekerjaan Front

Adapun yang menjadi pokok-pokok pekerjaan KPR dalam perjuangan antara lain:

1. Memperjuangkan hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat.
2. Aktif dalam kerja-kerja solidaritas untuk perubahan nasib masyarakat.
3. Mengkampanyekan dan memperjuangkan sistem ekonomi politik yang adil, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
4. Terlibat dalam membangun dan mengkonsolidasikan organisasi-organisasi rakyat yang sesuai dengan arah perjuangan bersama.

Keempat pokok-pokok pekerjaan tersebut di atas merupakan hal wajib yang perlu dilakukan dalam setiap rutinitas kerja-kerja perjuangan KPR, dengan memperhatikan orientasi garpol dan platform perjuangan.

F. Isu-isu Umum Front

Isu-isu umum front yang dimaksudkan adalah isu (*issue*) yang merupakan tuntutan dalam perjuangan KPR—yang dikemas sedemikian rupa—sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi di Indonesia dan dihadapi oleh massa rakyat. Adapun issue atau tuntutan yang sering disuarakan dalam setiap perjuangan KPR yaitu meliputi:

1. *Empat Tuntutan Umum Rakyat:*

- Wujudkan Keadilan dan Jaminan sosial;
- Demokrasi untuk Rakyat;
- Hapus Hutang Luar Negeri;
- Sita Harta dan Aset Para Koruptor.

2. *Tuntutan Mendesak Rakyat:*

- Tuntutan mendesak merupakan isu-isu aktual yang sedang berkembang saat ini, sehingga bersifat tidak tetap dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi nasional maupun kondisi disetiap daerah. Namun setidaknya, dalam perumusan tuntutan mendesak akan dikontekstualkan dengan persoalan yang dihadapi oleh massa rakyat berdasarkan konteks ruang dan waktu tertentu yang mencakup issue perburuhan, petani, nelayan, kaum miskin kota, agraria, kesehatan, pendidikan, demokrasi, maupun berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak terhadap massa rakyat pada umumnya.

3. *Jalan Keluar Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia:*

- Wujudkan Reforma Agraria Sejati;
- Nasionalisasi Aset-Aset Strategis di Bawah Kontrol Rakyat;
- Bangun Industrialisasi Nasional yang Kuat dan Mandiri;
- Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan;
- Bangun Partai Massa Rakyat untuk Persatuan Kelas dan Pembebasan Nasional Melawan Kapitalisme-Imperialisme.

Dari ketiga komponen *issue* di atas, yakni tuntutan umum rakyat, tuntutan mendesak rakyat dan jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan setiap agenda perjuangan KPR. Hal ini bisa dilihat dari setiap pernyataan sikap KPR dalam bentuk pers rilis (*press release*) yang diterbitkan.

G. Perluasan Struktur dan Basis

Kesatuan Perjuangan Rakyat Sudah menyebar di 17 provinsi dan 31 kabupaten/kota, dengan akumulasi keanggotaan senasional kurang lebih sebanyak 5.000 orang. Adapun provinsi yang dimaksud yaitu Sumatra Utara, Riau, Bandar

Lampung, Kalimantan Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku.

Kemudian kota/kabupaten yang dimaksud adalah kota Jakarta, Bekasi, Karawang, Cikarang, Tangerang, Bogor, Surabaya, Kediri, Malang, Yogyakarta, Pekalongan, Semarang, Mataram, Bima, Sumbawa, Dompu, Ternate, Tidore, Bacan, Morotai, Luwuk, Manado, Palu, Gorontalo, Luwuk, Makasar, Medan, Pekan Baru, Lampung, Metro dan Tanjung Selor.

Selanjutnya, jumlah anggota yang dimaksud yaitu bersal dari sekitar 2.300 orang dari massa anggota Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), sekitar 1.200 orang dari massa anggota Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), sekitar 600 orang dari massa anggota Barisa Masyarakat Indonesia (BMI), kemudian sekitar 300 orang dari massa anggota Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) dan selebihnya berasal dari organisasi tingkat lokal serta individu yang bukan perwakilan dari organisasi massa manapun.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa untuk di pulau Kalimantan KPR hanya ada di satu provinsi dan satu kota saja sementara yang lain masih dalam proses perluasan. Kemudian untuk pulau Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Bali belum ada KPR dan sedang mengupayakan perluasan struktur dan basis. KPR lebih masif di pulau Jawa, NTB, dan Maluku Utara. Jika dibandingkan dengan total jumlah wilayah dan daerah di Indonesia, yakni 37 provinsi, jumlah kabupaten 416 dan 98 kota; maka perluasan struktur dan basis KPR saat ini masih relatif sedikit.

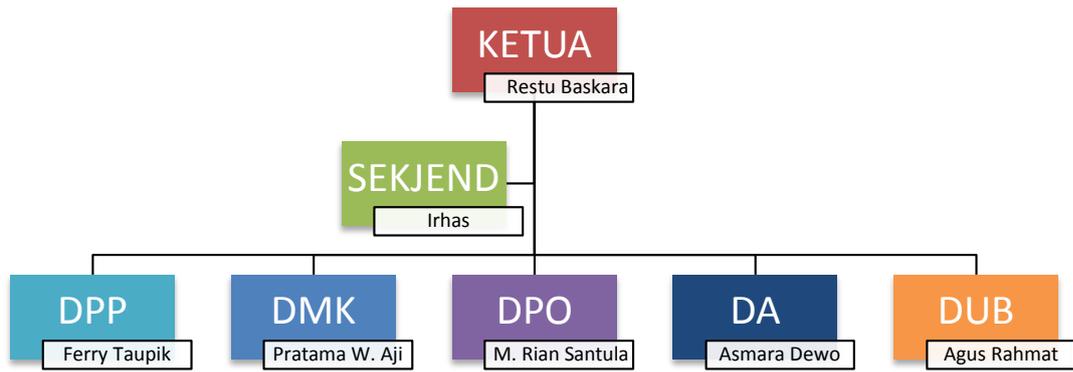
H. Struktur Front

Untuk melaksanakan program kerja organisasi, maka perlu adanya struktur kepengurusan dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Adapun susunan struktur kepengurusan sebagai berikut:

1. Di tingkat nasional disebut Badan Pekerja Nasional (BPN), yang terdiri dari:
 - Presidium. Ketua Umum (Ketum)
 - Sekretaris Jenderal (Sekjend)
 - Departemen Pendidikan dan Penelitian (DPP)
 - Departemen Media dan Kampanye (DMK)
 - Departemen Perluasan Organisasi (DPO)
 - Departemen Advokasi (DA). Departemen Usaha Bersama (DUB)

2. Di tingkat daerah disebut Badan Pekerja Daerah (BPD), yang terdiri dari:
 - Ketua
 - Sekretaris Jenderal (Sekjend)
 - Departemen Pendidikan dan Penelitian (DPP)
 - Departemen Media dan Kampanye (DMK)
 - Departemen Perluasan Organisasi (DPO)
 - Departemen Advokasi (DA)
 - Departemen Usaha Bersama (DUB)

Bagan 2.1 Struktur KPR-BPD Yogyakarta



Sumber: Profil Organisasi KPR-BPD Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA:

- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi: 2015. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 2002. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ramly, Andi Muawiyah. 2013. *Peta Pemikiran Karl Marx*. Yogyakarta: LKiS.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Randall, Vicky dan Lars, Svasand. 2002. *Party Institutionalisation in New Democracies*. Party Politics.
- Aidit, Dipa Nusantara. 1963. *Tentang Marxisme*. Jakarta: Akademik Ilmu Sosial Aliarcham.
- Engels, Frederick. 2005. *Dialektika Alam*. Jakarta: Hansa Mitra.
- Engels, Frederick. 2007. *Anti Duhring: Revolusi Herr Eugen Duhring Dalam Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Hansa Mitra.
- Prawironegoro, Darsono. 2012. *Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Lorimer, Doug. 2013. *Pokok-pokok Materialisme Historis*. Yogyakarta: Bintang Nusantara.
- Marx, Karl dan Frederick Engels. 2014. *Manifesto Partai Komunis*. Yogyakarta: Cakrawangsa.
- Marx, Karl dan Frederick Engels. 2013. *Ideologi Jerman*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Suseno, Franz Magnis. 2000. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Plato. 2018. *Republik*. Yogyakarta: Narasi.
- Aristoteles. 2017. *Politik*. Yogyakarta. Narasi.
- Koirudin. 2015. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Imawan, Riswandha. 1998. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ambardi, Kushridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2016. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Blackburn, Susan. 2011. Jakarta: *Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Depok Masup.
- Zaprul Khan. 2016. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Konterporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Azwar, Rully Chairul. 2017. *Partai Politik Ditengah Ancaman Virus Oligarki dan Politik Kartel*. Jurnal Penelitian.
- Sunardi. 2020. *Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan*. Jurnal Politik Profetik.
- Novianto, Arif; dkk. 2018. *Dinamika Partai Rakyat Demokratik (PRD) Di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas*. Jurnal Penelitian Politik.

- Novianto, Arif; dkk. 2016. *Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri: Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza Di Yunani*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
- Kristinawati, Putri. 2013. *Peran Partai Bolshevik Dalam Revolusi 1917 Dibawah Pimpinan Vladimir Lenin*. Skripsi Penelitian.
- Noor, Firman. 2007. *Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradikma Baru Partai Politik*. Jurnal Penelitian.
- Noor, Firman. 2017. *Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya*. Jurnal Penelitian.
- Hanafi, Ridho I. 2018. *Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019*. Jurnal Penelitian.
- Budiatri, Aisah P; dkk. 2017. *Faksi dan Konflik Internal Partai-partai Di indonesia Era Reformasi*. Jurnal Penelitian.
- Nurhasim, Moch. 2013. *Kegagalan Reformasi Partai Politik Di Era Reformasi*. Jurnal Penelitian.
- Prakoso, Aji M dan Indrawan, Jerry. 2020. *Hambatan dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilu 2024*. Jurnal Penelitian.
- Frumensius, Mandur. 2018. *Posisi Gerakan Kiri Dalam Ruang Demokrasi*. Skripsi Penelitian.
- Syifa, Hafidh. 2021. *Partai Murba: Dalam dinamika Revolusi dan Politik Indonesia (1948-1965)*. Skripsi Penelitian.
- <https://id.wikipedia.org/>.
- <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/06420001/ini-daftar-13-parpol-yang-usung-caleg-eks-koruptor>.
- <https://dialektika-nusantara.blogspot.com/2016/10/pemikiran-marx-dan-konsep-negara.html>.
- <https://arahrakyat.com/komite-perjuangan-rakyat-sikap-politik-mei-berlawan-2020/>.

<https://www.marxists.org/indonesia/marx-engels/tesis-tentang-feuerbach>.

<https://bantuanhukum.or.id/pernyataan-sikap-gerakan-buruh-untuk-rakyat-bangun-kekuatan-politik-alternatif-wujudkan-indonesia-berkeadilan/>.

<https://indoprogress.com/2019/08/demokrasi-tidak-dengan-sendirinya-demokratis/>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/13081761/mengenang-mereka-yang-meninggal-dalam-aksi-reformasidikorupsi?page=all>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

➤ Untuk Pengurus KPR

1. Sistem partai massa rakyat menurut Kesatuan Perjuangan Rakyat
 - Mengapa KPR hendak membangun partai massa rakyat?
 - Apa Platform dan ideologi partai massa yang ingin dibangun?
 - Bagaimana konsep partai massa rakyat menurut KPR?
 - Dimana basis massa KPR saat ini?
2. Tujuan pembangunan partai massa rakyat oleh kesatuan perjuangan rakyat
 - Apa tujuan KPR membangun partai massa rakyat?
 - Apa yang akan dilakukan KPR ketika partai massa rakyat terbentuk?
3. Perencanaan yang dilakukan oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam upaya pembangunan partai massa rakyat
 - Bagaimana tahapan perencanaan yang dilakukan KPR dalam upaya membangun partai?
 - Siapa yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut?
 - Kapan partai massa rakyat akan di deklarasikan?
4. Strategi yang dilakukan dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat
 - Bagaimana strategi KPR dalam membangun partai massa rakyat?
 - Siapa saja yang menjadi sasaran pengorganisiran KPR untuk menunjang pembangunan partai?
 - Bagaimana strategi mobilisasi massa yang dilakukan sehingga wacana alternatif tersebut dapat diterima?
5. Capaian yang diperoleh dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat
 - Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam upaya membangun partai massa rakyat?
 - Bagaimana respon publik terhadap tawaran alternatif tersebut?
6. Hambatan dalam upaya pembangunan partai massa rakyat oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat
 - Apakah ada hambatan yang dialami selama pembangunan partai massa? Jika ada mengapa?

➤ **Untuk Simpatisan KPR**

1. Apa pendapat saudara mengenai upaya pembangunan partai massa rakyat yang dilakukan oleh KPR?
2. Mengapa saudara merasa tertarik dengan gagasan pembangunan partai alternative oleh KPR, padahal diluar sana ada banyak partai politik?
3. Apakah saudara pernah terlibat atau dilibatkan dalam beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh KPR?
4. Apa harapan saudara ketika partai massa rakyat telah berhasil terbentuk?

Dokumentasi Wawancara



Foto setelah wawancara dengan Bung Restu selaku Ketua KPR-BPD Yogyakarta



Foto wawancara dengan bung Irhas selaku Sekretaris Jendral KPR Yogyakarta



Foto setelah wawancara dengan bung Ferri selaku Departemen Pendidikan dan Penelitian (DPP)



Foto setelah wawancara dengan bung Rian selaku Departemen Pengembangan Organisasi (DPO)



Foto setelah wawancara dengan bung Dewo selaku Departemen Advokasi (DA)



Foto wawancara via *zoom* dengan bung Pratama selaku Departemen Media dan Kampanye (DMK)



Fotot wawancara dengan bung Agus Rahmat selaku Departemen Usaha Bersama (DUB)



Foto wawancara dengan bung Ahyar selaku simpatisan KPR



Foto wawancara dengan bung Agus Nurdin selaku simpatisan KPR



Foto wawancara dengan bung Wahid selaku Simpatisan KPR

Dokumentasi Kegiatan KPR



Logo Kesatuan Perjuangan Rakyat



Foto saat Pendidikan Ideologi KPR BPD Yogyakarta (Februari 2022)



Foto aksi KPR Jogja dalam memperingati Hari Buruh Internasional (1 Mei 2021)



Foto Aksi Mobilisasi Nasional 2018



Foto aksi KPR Jogja dalam memperingati hari HAM Internasional 2019



Foto aksi serentak KPR sensasional



Foto aksi KPR Jogja dalam memperingati Hari Buruh 2022

Pelaksanaan Rapat Pleno Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR). Bogor, 06 - 07 Agustus 2022.

"Evaluasi, rekomendasi dan kritik oto kritik adalah keharusan dalam Front Politik Demokratik sebagai pengkualitasan menuju pembangunan partai massa rakyat".

#perkuatfrontpolitik #bangunpartaimassa



Foto saat Rapat Pleno Nasioan KPR 2022 (sumber: Facebook @Kesatuan Perjuangan Rakyat)

Poster/pamflet Propaganda KPR

